NALAR INSTITUTE

POLICY PAPER

MEMAKNAI RELASI NEGARA DAN WARGA NEGARA DI INDONESIA PASCA-2019

Ketika Bersuara Tidak Cukup: Aksi Protes, Ancaman *Exit*, dan Respons Negara



MEMAKNAI RELASI NEGARA DAN WARGA NEGARA DI INDONESIA PASCA-2019

Ketika Bersuara Tidak Cukup: Aksi Protes, Ancaman Exit, dan Respons Negara

Terbit pertama kali dalam Bahasa Indonesia pada bulan November 2026 oleh Nalar Institute.
Jl. Tomat, Ngemplak, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Indonesia
www.nalarinstitute.com

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0.

Hak Cipta dilindungi secara terbatas.

Penelitian ini dilakukan secara independen oleh Nalar Institute.

Tim penulis dan peneliti utama[*]:
Yanuar Nugroho
Dhivana Anarchia Ria Lay
Ani Nur Mujahidah Rasunnah

Penasihat akademis dan penanggung jawab:
Yanuar Nugroho
Asisten Riset:
Jose Fernando
Penyunting Bahasa Indonesia:
Anendya Niervana
Desain:
Haniatussa'adah

Cara mengutip naskah ini:
(Nugroho, Y., et al., 2026) - Nugroho, Y., Lay, DAR., Rasunnah, ANM. (2026) Memaknai Relasi Negara Dan Warga Negara di Indonesia Pasca-2019: Ketika Bersuara Tidak Cukup: Aksi Protes, Ancaman Exit, dan Respons Negara, Yogyakarta: Nalar Institute.

[*] Penulis kedua dan ketiga berkontribusi sama besar.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

Latar Belakang 4

Kerangka Konseptual 5

Mendefinisikan Exit, Voice, dan *Loyalty* 5
Operasionalisasi Voice 6

Metodologi 7

Pendekatan Penelitian 7
Objek Penelitian 7
Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 8
Kerangka Analisis 8

BAB II DARI MOGOK HINGGA MEMBAKAR: SPEKTRUM VOICE DALAM AKSI PROTES DI INDONESIA PASCA-2019 10

Kilas Balik 13 Aksi Protes 11

Aksi Kamisan (2007–sekarang) 11
Demonstrasi Pengemudi Ojek Online (2015–sekarang) 12
Hari Buruh/May Day (2019–sekarang) 13
#ReformasiDikorupsi–Penolakan RUU KPK dan RKUHP (2019) 14
Demonstrasi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (2020) 15
Protes Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 (2020–2023) 16
Aksi Penolakan Kenaikan UKT (2024) 17
#PeringatanDarurat – Penolakan RUU Pilkada (2024) 18
Protes Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen (2025) 19
#IndonesiaGelap (2025) 20
Demonstrasi Penolakan RUU TNI (2025) 20
Demonstrasi Agustus–September 2025–Tuntutan 17+8 (2025) 21
Menuju Indonesia Bangkrut (2026) 23

Dengan atau Tanpa Ancaman: Spektrum *Voice* dalam Aksi Protes di Indonesia 23

Voice dengan Ancaman Exit yang Kredibel 23
Voice Tanpa Ancaman Exit yang Kredibel 25

BAB III DIDENGAR ATAU DIABAIKAN: POLA RESPONS PEMERINTAH TERHADAP AKSI PROTES PASCA-2019 28

Sikap Pemerintah terhadap Tuntutan Aksi: Tiga Corak Respons yang Muncul 29

Menjawab Penuh Tuntutan Utama 29
Menjawab Sebagian Tuntutan Utama 30
Tidak Menjawab Tuntutan Utama 31

Membaca Pola yang Muncul: Kapan dan Mengapa Pemerintah Merespons *Voice* Masyarakat 32

Temuan 1: Ancaman Exit dan Dependensi Negara 32
Temuan 2: Pertemuan Kepentingan dan Konsolidasi Elite Politik 33
Temuan 3: Ketepatan momentum dan tuntutan yang sepadan 34

Warga yang Tidak Setara di Mata Negaranya: Relasi Indonesia dan Warganya Pasca-2019 35

BAB IV PENUTUP 37

Kesimpulan 38

DAFTAR PUSTAKA 39

1

PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah relasi negara dan warga negara di Indonesia diwarnai oleh tarik-ulur negosiasi dan renegosiasi kontrak sosial. Pada era Orde Lama, kumpulan mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah Soekarno dan melayangkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, merombak kabinet Dwikora, dan menurunkan harga pangan (Detiknews, 2023). Tarik ulur negosiasi ini berujung pada runtuhnya era Demokrasi Terpimpin yang menandai dimulainya Orde Baru (Mardianti, 2022). Era Orde Baru menawarkan kontrak sosial baru berbasis ideologi Pancasila dan semangat pembangunan yang menciptakan hubungan layaknya bapak dan anak antara negara dan warganya (Hadiz, 2000). Kontrak sosial ini berjalan selama 32 tahun sebelum akhirnya meledak di jalanan pada 1998. Reformasi 1998 lantas membuka lebar gerbang renegosiasi kontrak sosial dan membawa babak baru relasi negara dan warga negara di Indonesia.

Babak baru ini ditandai oleh perubahan fundamental dalam arsitektur relasi negara dan warga negara yang terjadi di tiga aras secara simultan: aras individual—lewat pergantian kekuasaan di luar rutinitas (mundurnya Soeharto), aras otoritas, dan aras norma—keduanya melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahan UU (Karim, 2020). Lewat renegosiasi ini, hubungan eksekutif dan legislatif, sistem pemilu dan kepartaian, serta hubungan pusat dan daerah (desentralisasi dan otonomi daerah) mengalami pembaruan mendasar (Karim, 2020). Meski pertanyaan tentang apakah renegosiasi kontrak sosial ini pernah benar-benar tuntas masih bisa diperdebatkan, dekade selepas Reformasi 1998 mencatat konsolidasi demokrasi yang relatif stabil di Indonesia. Puncaknya ditandai oleh terpilihnya Joko Widodo, seorang presiden dari luar lingkaran elite pada Pemilu 2014 (Aspinall dan Mietzner, 2014).

Namun, euforia ini tidak bertahan lama. Dua periode kepemimpinan Joko Widodo ditandai dengan bangkitnya kembali otoritarianisme dan, sebagai konsekuensinya, kemunduran demokrasi (Jaffrey dan Warburton, 2025). Pada Oktober 2019, aksi protes bertajuk #ReformasiDikorupsi meledak di jalanan berbagai kota, menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didorong rezim. Pelemahan KPK, anak kandung reformasi, melalui revisi UU tersebut dinilai menciderai semangat dari renegosiasi kontrak sosial nyaris dua dekade silam. Momen ini menjadi titik balik relasi negara dan warga negara pasca-reformasi 1998.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menelisik relasi Indonesia dan warganya pasca-2019 melalui analisis respons pemerintah terhadap berbagai aksi protes masyarakat *(voice)* di tingkat nasional. Dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: (1) bagaimana cara *voice* disuarakan dalam aksi-aksi protes pasca-2019 dan (2) bagaimana pemerintah merespons berbagai *voice* yang disuarakan tersebut?

Kerangka Konseptual

Mendefinisikan Exit, Voice, dan *Loyalty*

Penelitian ini mengadaptasi kerangka *Exit, Voice, and Loyalty* (EVL) yang dicetuskan oleh Albert O. Hirschman (1970). Hirschman memperkenalkan EVL sebagai kerangka untuk membaca respons individu terhadap kemunduran dalam organisasi, baik dalam konteks perusahaan, partai politik, maupun negara. Dalam kerangka ini, anggota yang tidak puas atas kinerja atau hasil *(output)* suatu organisasi memiliki tiga opsi respons: *exit,* meninggalkan organisasi; *voice,* menyuarakan ketidakpuasan untuk mendorong perubahan dalam organisasi; atau *loyalty,* bertahan dan menerima kondisi eksisting sambil berhadap ada perbaikan.

Kerangka ini bermula dari pengamatan Hirschman terhadap dunia bisnis. Dalam konteks tersebut, *exit* terjadi ketika pelanggan berhenti membeli produk dan beralih ke alternatif lain. Namun, pilihan ini terbuka selama tersedia barang substitusi, atau dengan kata lain terdapat kompetisi. Sementara itu, *voice* terjadi saat pelanggan menyuarakan ketidakpuasan melalui keluhan dengan harapan perusahaan melakukan perbaikan. Mekanisme ini dapat muncul ketika tidak ada alternatif (kesempatan untuk *exit*) yang tersedia. *Loyalty* adalah kecenderungan untuk bertahan meski ada ketidakpuasan karena pelanggan masih percaya perusahaan akan berbenah. Hirschman mengilustrasikan dinamika ini melalui kasus Nigerian Railways di mana penurunan kualitas layanan kereta api Nigeria mendorong penumpang beralih ke bus dan truk sebagai alternatif. Di Indonesia, pola serupa terlihat ketika konsumen beramai-ramai pindah dari SPBU Pertamina ke SPBU Swasta menyusul dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite (Kompas.com, 2025)

Meskipun dicetuskan dalam konteks organisasi ekonomi, kerangka EVL telah dikembangkan oleh berbagai ahli untuk menganalisis relasi negara dan warga negara. Pengembangan yang paling relevan bagi penelitian ini dilakukan oleh Clark dkk. (2012) yang memformulasikan ulang EVL secara spesifik dalam konteks relasi negara dan warganya. Clark dkk. memodelkan relasi ini sebagai sebuah permainan strategis *(EVL Game)* antara negara dan warga di mana pilihan masing-masing pihak bergantung pada kalkulasi biaya *(cost)* dan manfaat *(benefit).* Ketika negara mengeluarkan kebijakan yang dianggap masyarakat berdampak negatif bagi kesejahteraan mereka, tiga opsi respons bisa dipilih. Pertama, *exit,* yakni mengakui perubahan yang ada dan mengubah perilakunya sendiri. Clark dkk. mengambil contoh jika ada negara bagian di Amerika Serikat yang melarang kepemilikan senjata api, warga dapat melakukan *exit* dengan cara berpindah ke daerah lain yang mengizinkan kepemilikan senjata api. Kedua, *voice,* yakni berupaya untuk mengembalikan ke kondisi semula melalui pengajuan keluhan, protes, *lobbying,* dan aksi lainnya. Ketiga, *loyalty,* yakni menerima perubahan tanpa mengubah perilakunya sama sekali.

Pengembangan EVL dalam konteks hubungan negara dan warganya juga dilakukan oleh Ireland (2021) yang menganalisis respons masyarakat terhadap ketidakadilan *(injustices)* yang terjadi. Hal yang paling menarik dalam tulisan Ireland adalah perluasan pemaknaan

loyalty yang aktif alih-alih pasif seperti anggapan Hirschman (1970).[†] Menurut Ireland, *loyalty* menandakan adanya kepercayaan terhadap organisasi dan sistem yang bekerja sehingga segala bentuk tindakan yang bekerja di dalam sistem masuk ke dalam kategori respons ini. Dengan argumen ini, Ireland lebih jauh mengembangkan definisi *exit* menjadi tindakan yang secara eksplisit dan sengaja tidak ingin melibatkan negara di dalam prosesnya. Ireland mencontohkan upaya mengatasi kejahatan dengan melibatkan kepolisian *(loyalty)* dan melalui *vigilantism*[‡] *(exit).*

Kontribusi Sharp (1984) turut membawa dimensi menarik soal *loyalty.* Sharp mengaplikasikan kerangka EVL dalam konteks pemerintahan kota di Amerika Serikat. Sharp tidak melihat respons *loyalty* sebagai kesetiaan buta terhadap negara. Justru, Sharp menawarkan pembacaan yang lebih kritis, yakni membedakan antara para loyalis (yang bertahan karena masih percaya perbaikan akan terjadi) dan non-loyalis (yang bertahan karena tidak memiliki pilihan lain).

Berangkat dari tinjauan literatur di atas, penelitian ini mendefinisikan EVL sebagai berikut. *Exit* adalah segala bentuk tindakan yang secara sadar dan sengaja tidak melibatkan negara di dalamnya. Artinya, *exit* tidak dimaknai secara sempit sebagai 'keluar' atau 'berpindah' secara fisik. *Voice* adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mengubah *status quo* atau mengembalikan ke kondisi semula. *Loyalty* adalah segala bentuk tindakan yang secara sadar dan sengaja tetap melibatkan negara di dalamnya guna mempertahankan *status quo* atau menerima perubahan. Namun, mereka yang memilih respons ini tidak selalu berarti menerima karena sepakat, tetapi bisa juga karena tidak memiliki opsi lain.

Operasionalisasi Voice

Dalam memahami respons *voice,* penelitian ini mengadopsi pemikiran Clark dkk. (2012). Kerangka EVL Game milik Clark dkk. mengajukan dua argumen penting mengenai relasi kuasa yang mendorong negara untuk merespons warganya. Pertama, Clark dkk. berargumen bahwa *voice* warga cenderung lebih efektif apabila disertai ancaman *exit* yang kredibel *(credible exit threat).* Ancaman *exit* yang kredibel ialah ancaman yang berpotensi membawa dampak negatif serius bagi negara dan mungkin *(possible)* untuk betul-betul dilakukan. Bagi Clark dkk., tanpanya, negara cenderung tidak memiliki insentif lebih untuk merespons.

Kedua, respons negara terhadap *voice* bergantung pada tingkat ketergantungan negara terhadap warganya yang dibagi ke dalam dua kategori yakni negara *autonomous* (tidak bergantung kepada warganya) dan *dependent* (bergantung kepada warganya). Clark dkk. melihat dependensi ini berdasarkan ketergantungan negara terhadap tenaga kerja

[†] Hirschman (1970) mengonseptualisasikan *loyalty* sebagai ketidakinginan pegawai (atau dalam konteks ini warga negara) untuk *exit* dan lebih memilih 'menderita dalam diam' *(suffering in silence)* dengan keyakinan bahwa keadaan akan membaik.

[‡] *Vigilantism* secara sederhana didefinisikan oleh Ireland sebagai tindakan 'main hukum sendiri'. Dalam Ireland (2021), tindakan *exit* berupa *vigilantism* contohnya komunitas Quechua di Bolivia yang mengubur hidup-hidup seorang pembunuh dan pemerkosa. Tindakan *vigilantism* tidak melibatkan aktor/institusi negara, tidak melibatkan negara, dan secara eksplisit warga tidak mau negara terlibat. Ireland menyebut ada tiga alasan mengapa *exit* berupa *vigilantism* dilakukan oleh warga: sistem hukum yang tebang pilih, negara dianggap tidak efektif, dan rendahnya legitimasi negara.

(labor) dan kapital yang dimiliki oleh warganya. Clark dkk. berargumen bahwa negara *autonomous* akan lebih memberatkan manfaat *(benefit)* yang diambil ketimbang mempertahankan *loyalty* warganya (L < 1), sedangkan negara *dependant* setidak-tidaknya menganggap *loyalty* warganya setara dengan manfaat yang diambil (L ≤ 1). Oleh karena itu, negara yang *dependant* akan cenderung menjawab *voice* dan negara *autonomous* mengabaikannya. Kerangka inilah yang menjadi landasan operasional penelitian ini dalam memetakan tipologi *voice* dan menganalisis pola respons pemerintah.

Metodologi

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis komparatif terhadap 13 aksi protes masyarakat di tingkat nasional pada periode 2019–2026. Dalam melakukan analisis komparatif, penelitian tidak berhenti pada deskripsi peristiwa per peristiwa, tetapi juga melihat bentuk *voice* yang muncul dan respons pemerintah terhadapnya lintas aksi protes. Penelusuran pola ini berguna untuk mencerminkan dinamika yang lebih mendalam dalam relasi negara dan warga negara.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah aksi-aksi protes masyarakat yang dilakukan secara langsung *(in-person)*, berskala nasional, dan dilakukan pada periode 2019–2026. Demonstrasi dipilih sebagai titik analisis utama karena ia merupakan salah satu bentuk *voice* yang paling nyata dan terukur dalam melihat relasi negara dan warga negara. Hadirnya demonstrasi langsung menandakan adanya persoalan dalam saluran aspirasi formal yang ditawarkan oleh demokrasi representatif, dan respons pemerintah atas aksi tersebut mencerminkan cara negara memandang serta memperlakukan warganya.

Aksi protes yang masuk dalam objek penelitian ini dipilih berdasarkan empat kriteria. Pertama, aksi protes berlangsung atau memiliki episode penting dalam rentang waktu 2019–2026. Kedua, tuntutan aksi ditujukan kepada pemerintah pusat secara langsung, baik dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan maupun penyelenggara layanan publik. Ketiga, skalanya masif dengan ditandai oleh keterlibatan massa yang besar secara kuantitas, jangkauan lintas daerah, atau persistensi dalam rentang waktu yang panjang. Terakhir, aksi protes dilakukan secara langsung di ruang publik meskipun beberapa di antaranya juga diiringi oleh aktivisme di media digital. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, penelitian ini menganalisis 13 aksi protes berikut:

1. Aksi Kamisan (2007–sekarang)
2. Demonstrasi Ojek *Online* (2015–sekarang)
3. Hari Buruh/May Day (2019–sekarang)
4. #ReformasiDikorupsi–Penolakan RUU KPK dan RKUHP (2019)
5. Demonstrasi Penolakan UU Cipta Kerja (2020)
6. Protes Tenaga Kesehatan–Insentif Covid-19 (2020–2023)
7. Aksi Penolakan Kenaikan UKT (2024)

8. #PeringatanDarurat–Penolakan RUU Pilkada (2024)
9. Protes Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen (2025)
10. #IndonesiaGelap (2025)
11. Demonstrasi Penolakan RUU TNI (2025)
12. Demonstrasi Agustus–September 2025–Tuntutan 17+8 (2025)
13. Menuju Indonesia Bangkrut (2026)

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penentuan 13 aksi protes dalam penelitian ini dilakukan secara purposif berdasarkan empat kriteria yang telah diuraikan di atas. Data untuk setiap protes dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber sekunder yang meliputi artikel jurnal, dokumen kebijakan yang relevan, siaran pers pemerintah, pemberitaan media massa, laporan organisasi masyarakat sipil, dan sumber lain yang relevan. Penelusuran ini bertujuan untuk menghimpun detail kronologi setiap aksi protes yang mencakup latar belakang munculnya aksi, tuntutan aksi, cara tuntutan disuarakan (termasuk ancaman *exit* jika ada), dan respons pemerintah.

Kerangka Analisis

Kajian ini menggunakan kerangka konseptual *Exit, Voice, and Loyalty* (EVL) Hirschman (1970) sebagai landasan analitis yang dioperasionalkan melalui pengembangan konseptual Clark dkk. (2012) dan Ireland (2021) untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama (bagaimana *voice* disuarakan dalam aksi-aksi protes pasca-2019?) dijawab dengan memetakan bentuk-bentuk *voice* yang muncul dalam 13 aksi protes. Adapun *voice* didefinisikan sebagai segala tindakan yang bertujuan untuk mengubah *status quo* atau mengembalikan ke kondisi semula (Hirschman, 1970; Ireland, 2021). Bentuk-bentuk *voice* kemudian dipetakan ke dalam dua tipologi yang terinspirasi dari Clark dkk. (2012): *voice* yang disertai ancaman *exit* yang kredibel (*voice with credible exit threat*) dan *voice* tanpa ancaman *exit* yang kredibel (*voice without credible exit threat*). Kredibilitas dari ancaman *exit* dilihat berdasarkan kemungkinan apakah ancaman tersebut benar-benar dilakukan (Clark dkk., 2012). *Exit* sendiri dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang secara sadar dan sengaja tidak melibatkan negara di dalamnya.

Pertanyaan penelitian kedua (bagaimana pemerintah merespons *voice* yang disuarakan?) dijawab dengan memetakan respons pemerintah terhadap tuntutan utama setiap aksi protes. Kategorisasi respons dibangun secara induktif mengikuti pola respons yang muncul, yakni dijawab penuh, sebagian, dan tidak dijawab. Interaksi antara *voice* dan respons pemerintah akan dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep *dependent* dan *autonomous state* Clark dkk. (2012) serta konsep-konsep lain yang relevan yang diidentifikasi dalam proses analisis. Adapun *dependent state* dimaknai sebagai negara yang bergantung kepada warganya. Alur analisis penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah.



Gambar 1 Kerangka Analisis Penelitian (Diolah oleh Penulis)

2

DARI MOGOK HINGGA MEMBAKAR: SPEKTRUM *VOICE* DALAM AKSI PROTES DI INDONESIA PASCA-2019



BAB II
DARI MOGOK HINGGA MEMBAKAR: SPEKTRUM *VOICE* DALAM AKSI PROTES DI INDONESIA PASCA-2019

Tahun 2019 menjadi titik balik dari relasi negara dan warga negara pasca-Reformasi. Pada akhir September tahun itu, ribuan mahasiswa memadati jalanan di Jakarta, Yogyakarta, dan puluhan kota lain untuk menolak revisi UU KPK dan RKUHP, dalam gelombang yang kerap disebut sebagai gerakan mahasiswa terbesar sejak 1998. Sejak saat itu, jalanan kembali menjadi arena tempat warga menegosiasikan ulang hubungannya dengan negara. Mereka yang turun ke jalan bukan hanya mahasiswa. Keluarga korban pelanggaran HAM berdiri diam di depan Istana setiap Kamis sore. Pengemudi ojol mematikan aplikasi secara serentak. Buruh menggelar mogok nasional. Tenaga kesehatan dan dosen mengancam berhenti bekerja. Di ujung lain spektrum, massa membakar gedung-gedung DPRD. Tuntutan mereka pun beragam, mulai dari besaran tarif dan tunjangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi dan arah demokrasi.

Di balik keragaman itu tersimpan pertanyaan yang menjadi pijakan bab ini: dengan cara apa warga menyuarakan *voice*-nya dan seberapa jauh mereka bersedia melangkah ketika suaranya tidak didengar? Bab ini terlebih dahulu menelusuri kembali 13 aksi protes yang terjadi sepanjang 2019–2026, kemudian memetakan ragam *voice* di dalamnya ke dalam dua tipologi: *voice* dengan ancaman *exit* yang kredibel dan *voice* tanpa ancaman *exit* yang kredibel.

Kilas Balik 13 Aksi Protes

Aksi Kamisan (2007–sekarang)

Aksi Kamisan pertama kali digelar pada 18 Januari 2007 di seberang Istana Negara, Jakarta, oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (Yudistira & Husodo, 2022). Aksi ini dipelopori oleh tiga korban pelanggaran HAM masa lalu: Maria Katarina Sumarsih, yang putranya tewas tertembak dalam Tragedi Semanggi I; Suciwati, istri mendiang Munir Said Thalib; dan Bedjo Untung, korban penahanan tanpa pengadilan pada peristiwa 1965–1966 (Yudistira & Husodo, 2022). Tuntutan utamanya adalah agar negara menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Berjalan selama 19 tahun, aksi ini telah melintasi tiga pemerintahan, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto.

Aksi Kamisan berlangsung secara damai dan simbolik. Setiap Kamis, peserta berdiri diam di depan Istana Jakarta dengan payung dan pakaian serba hitam sehingga aksi ini sempat dikenal sebagai "Aksi Diam" atau "Aksi Payung Hitam". Selain berdiri di depan Istana, JSKK konsisten mengirimkan surat kepada presiden yang menjabat (Kompas.id, 2024). Seiring waktu, aksi ini meluas ke 54 kota/kabupaten di Indonesia dan dua titik di luar negeri (Yudistira & Husodo, 2022).

Respons pemerintah berjalan lambat dan tidak pernah menyentuh tuntutan penyelesaian yudisial. Di era SBY, pemerintah sempat menemui peserta dan membalas sebagian surat, tetapi tanpa hasil berarti (Kompas.id, 2024). Jokowi sempat menerima peserta pada Mei 2018 dan berjanji memanggil Jaksa Agung serta Menkopolhukam, tetapi pertemuan itu tidak berlanjut (Kompas.id, 2018). Sejak 2016, pemerintahan Jokowi memilih pendekatan nonyudisial meski ditolak keluarga korban karena dinilai melanggengkan impunitas (BBC Indonesia, 2016; BBC Indonesia, 2017). Pendekatan ini baru memperoleh landasan hukum pada 2022 melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PPHAM) lewat Keppres No. 17 Tahun 2022. Pada 11 Januari 2023, Jokowi mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat (Setneg, 2023). Dua bulan kemudian, ia menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, lalu meluncurkan programnya di Pidie, Aceh pada Juni 2023 (Setneg, 2023).

Gestur ini sempat diapresiasi keluarga korban hingga Sumarsih mengaku sempat ingin menghentikan Aksi Kamisan. Namun, kepercayaan itu runtuh ketika Jokowi menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo yang dipandang sebagai tokoh kunci dalam penghilangan paksa aktivis 1997–1998 (Kompas.com, 2024). Pada Aksi Kamisan ke-838 yang berlangsung pada 17 Oktober 2024, menjelang pelantikan Prabowo, JSKK menyatakan berhenti berkirim surat kepada presiden (Kompas.com, 2024). Meski masih tetap berjalan setiap pekan, Aksi Kamisan masih belum mendapat respons dari pemerintahan Prabowo—menjadikannya satu-satunya presiden yang belum pernah menemui peserta Aksi Kamisan selama gerakan ini digelar.

Demonstrasi Pengemudi Ojek Online (2015–sekarang)

Unjuk rasa pengemudi ojek *online* (ojol) terekam sejak 2016 dan terus berulang hingga kini, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah (DetikNews, 2016). Akar persoalannya adalah pengemudi yang hanya berstatus sebagai mitra, bukan karyawan. Status ini membuat pendapatan dan perlindungan mereka bergantung pada kebijakan perusahaan aplikasi (Yasih, 2023). Pada 2018, misalnya, perang tarif antara Gojek dan Grab menekan pendapatan pengemudi hingga di bawah upah minimum regional (Tempo, 2018). Dari tahun ke tahun, tuntutan mereka relatif sama: menaikkan tarif batas bawah, menurunkan potongan platform, dan menjamin perlindungan hukum bagi pengemudi berstatus mitra.

Pengemudi ojol menyuarakan tuntutannya melalui sejmlah aksi massa. Ada yang digelar di depan Istana, gedung DPR, kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga di berbagai kota. Aksi juga dikemas secara simbolik. Pada "Aksi Tanpa Bicara" bulan Juli 2022, misalnya, sejumlah pengemudi menjahit mulut di depan Kemenhub (DetikNews, 2022). Pada "Aksi 205" tanggal 20 Mei 2025, demonstrasi di berbagai kota disertai ajakan untuk mematikan aplikasi secara serentak (Metro TV News, 2025).

Pemerintah relatif selalu merespons, terutama soal tarif. Setelah demonstrasi nasional Maret–April 2018, Presiden Jokowi menerima perwakilan pengemudi di Istana dan

menugaskan Menteri Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan tarif (Kumparan, 2018). Pada Maret 2019, Kemenhub menerbitkan Permenhub No. 12 Tahun 2019 sebagai payung hukum sementara bagi pengemudi ojol. Bersamaan dengan itu, terbit Kepmenhub KP 348 Tahun 2019 yang menetapkan tarif batas bawah Rp1.850–2.100 per kilometer (CNN Indonesia, 2019). Sejak itu, tarif beberapa kali disesuaikan, termasuk tiga kali sepanjang 2022 hingga terbitnya Kepmenhub KP 667 Tahun 2022 pada September. Dua bulan kemudian, Kepmenhub KP 1001 Tahun 2022 mewajibkan platform menyediakan asuransi keselamatan tambahan, layanan pengaduan, dan bantuan biaya operasional bagi pengemudi. Namun, tuntutan perlindungan sebagai pekerja tak kunjung terjawab. Regulasi perlindungan pengemudi yang diwacanakan Kemenaker sejak 2023 masih dikaji hingga 2025 (Katadata, 2024; Antaranews, 2025).

Tuntutan aksi pengemudi ojol direspons sedikit berbeda di era Presiden Prabowo. Aksi 205 misalnya, direspons dengan audiensi di Kemenhub dan rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR. Komisi V berkomitmen memasukkan undang-undang khusus transportasi *online* ke dalam Prolegnas (BBC Indonesia, 2025; Kompas.id, 2025). Pada Juni 2025, Kemenhub menyetujui kenaikan tarif hingga 15 persen, tetapi menilai potongan platform 20 persen sudah sesuai aturan (CNBC Indonesia, 2025; Tempo, 2025). Respons paling signifikan datang pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026, ketika Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (DetikFinance, 2026; RM.id, 2026). Perpres ini membatasi potongan aplikator maksimal 8 persen, lebih rendah dari tuntutan 10 persen pengemudi sehingga porsi pengemudi naik dari 80 persen menjadi minimal 92 persen (CNA Indonesia, 2026). Perpres ini juga mewajibkan jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan bagi pengemudi (RM.id, 2026).

Hari Buruh/May Day (2019–sekarang)

Hari Buruh Internasional atau May Day diperingati serikat buruh setiap 1 Mei dengan aksi serempak di berbagai kota. Tuntutannya berganti dari tahun ke tahun, tetapi beberapa isu terus berulang, seperti penolakan UU Cipta Kerja, penghapusan *outsourcing*, dan upah layak. Kajian ini berfokus pada dua episode yang memiliki pola *voice* dan respons pemerintah yang menarik, yakni May Day 2020 dan siklus May Day 2025–2026.

1. *May Day 2020*

   Di tengah pandemi Covid-19 dan gelombang PHK, serikat buruh mengusung tiga isu: tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja, stop PHK, serta liburkan buruh dengan upah dan THR penuh (Kompas.com, 2020). Pemicunya adalah pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang terus berjalan di DPR meski pandemi tengah berlangsung.

   Tuntutan disuarakan melalui ancaman unjuk rasa besar. Serikat buruh yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) awalnya mengancam akan berdemonstrasi besar-besaran pada 30 April di DPR dan Kemenko Perekonomian, tetapi mengurungkan niat setelah bertemu Presiden Jokowi (Kumparan, 2020). Pasalnya, Presiden Jokowi dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di UU Ciptaker (Kumparan, 2020). KSPI pun membatalkan aksi dan

memperingati May Day lewat kampanye virtual (Kompas.com, 2020). Namun, penundaan ini hanya sementara. Klaster ketenagakerjaan kembali dibahas dan disahkan bersama UU Cipta Kerja pada Oktober 2020.

2. *May Day 2025–2026*

   Dalam dua tahun ini, aksi May Day menggarisbawahi ketidakpastian kesejahteraan buruh di tengah pasar kerja yang memburuk (Kompas.id, 2025). Serikat buruh membawa enam tuntutan, yakni penghapusan *outsourcing*, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU Ketenagakerjaan, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pembentukan Satgas PHK (Setneg, 2025; InfoPublik, 2026).

   Meski membawa tuntutan yang mirip, aksi buruh terbelah. Sejumlah konfederasi, termasuk KSPI, merayakan May Day tahun 2025 di Monas bersama Presiden Prabowo (Kompas.tv, 2025). Pada 2026, KSPI bahkan sempat mengancam akan berdemonstrasi di DPR jika tidak diberi waktu bertemu Presiden. Setelah bertemu Prabowo pada 28 April, mereka membatalkan rencana itu dan memilih merayakan May Day di Monas (Kompas.com, 2026; Tempo, 2026).

   Sebaliknya, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memilih berunjuk rasa di depan DPR pada kedua tahun tersebut. Pada 2026, mereka menyebut perayaan bersama Presiden sarat kooptasi (Tempo, 2026). Aksi Gebrak pada May Day 2025 memanas hingga polisi menembakkan meriam air dan menangkap 14 orang (Tempo, 2025). Keempat belas orang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk paramedis dan paralegal (Tempo, 2025). Pada aksi May Day 2026, polisi menangkap 101 orang di sekitar DPR dengan tuduhan hendak memicu kerusuhan (Kompas.com, 2026).

   Respons pemerintah pun terbagi mengikuti pola tersebut. Lewat aksi Monas 2025, Prabowo berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK serta mempercepat pembahasan RUU PPRT (Setneg, 2025). Setahun kemudian di panggung yang sama, ia mengumumkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh (Liputan6, 2026) sekaligus Perpres No. 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojol (DetikFinance, 2026). Sementara Presiden berorasi, massa yang bersuara di luar Monas justru berhadapan dengan penangkapan dan proses hukum.

#ReformasiDikorupsi–Penolakan RUU KPK dan RKUHP (2019)

Pada akhir September 2019, gelombang demonstrasi pecah di berbagai kota di Indonesia. Pemicunya adalah upaya DPR periode 2014–2019 yang mengebut sejumlah RUU bermasalah di ujung masa jabatannya. Revisi UU KPK dibahas hanya dalam 12 hari dan disahkan pada 17 September 2019 (Antara, 2020), sementara RKUHP dijadwalkan disahkan pada 24 September 2019 (CNN Indonesia, 2019). Mahasiswa dari berbagai kampus, bersama buruh, aktivis, dan belakangan pelajar, turun ke jalan dengan tagar #ReformasiDikorupsi. Aliansi mahasiswa merumuskan tujuh tuntutan; menunda pembahasan RKUHP, mengadili elite penyebab

kerusakan lingkungan, mencabut revisi UU KPK, menolak pasal bermasalah di RUU Ketenagakerjaan dan Pertanahan, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan menghentikan penangkapan aktivis (Kompas.com, 2019). Aksi ini kerap disebut sebagai gerakan mahasiswa terbesar sejak 1998 (Sastramidjaja, 2020).

Penyebutan ini bukan tanpa alasan. Di Yogyakarta, aksi bertajuk #GejayanMemanggil pada 23 September 2019 mempertemukan lebih dari 5.000 mahasiswa di simpang tiga Gejayan. Mereka mengusung tujuh tuntutan yang sama. Ini adalah unjuk rasa mahasiswa terbesar di kota itu sejak 1998. Aksi berlangsung damai dan meriah layaknya festival politik dengan poster-poster kreatif buatan peserta (Savirani, 2023).

Di Jakarta, situasi jauh lebih panas. Pada 24 September 2019, ribuan mahasiswa memadati depan Gedung DPR dan sempat memblokade jalan tol dalam kota. Menjelang sore, aksi berujung bentrok. Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata (Tempo, 2019), sementara sebagian massa melempari aparat dengan batu dan petasan (Liputan6, 2019). Pada malam harinya, massa membakar pos polisi di Palmerah, Senayan, dan Slipi beserta sejumlah kendaraan. Polisi menyatakan para pembakar itu bukan mahasiswa (Detikcom, 2019; Tempo, 2019). Keesokan harinya, pelajar STM turut bergabung dalam aksi di Jakarta (Savirani, 2023).

Aksi ini memakan banyak korban. Sebanyak 254 mahasiswa dan 39 polisi terluka dalam aksi 24 September 2019 di Jakarta (Liputan6, 2019). Dua mahasiswa tewas di Kendari dalam aksi 26 September 2019, salah satunya akibat luka tembak (Jawa Pos, 2019). Secara nasional, lima orang meninggal dan lebih dari 240 orang ditangkap (Savirani, 2023).

Respons pemerintah berbeda untuk kedua RUU. Pada 20 September 2019, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP (CNN Indonesia, 2019) dan DPR akhirnya menunda RKUHP beserta empat RUU lain, termasuk RUU Pertanahan (Kompas.com, 2019). Untuk UU KPK, Jokowi sempat mempertimbangkan mengeluarkan Perppu setelah bertemu sejumlah tokoh pada 26 September 2019, tetapi Perppu tak pernah terbit (Kompas.com, 2019). UU KPK tetap berlaku pada 17 Oktober 2019 sebagai UU No. 19 Tahun 2019, meski tanpa tanda tangan Presiden (CNN Indonesia, 2019). Pada saat yang sama, Menristekdikti mengancam sanksi bagi rektor dan dosen yang menggerakkan mahasiswa berdemonstrasi (Tempo, 2019). RKUHP sendiri akhirnya disahkan pada Desember 2022 (Hukumonline, 2023).

Demonstrasi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (2020)

Gagasan *Omnibus Law* Cipta Kerja pertama kali dilontarkan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2019 (Tempo, 2019) dan drafnya diserahkan ke DPR pada Februari 2020 (Kompas.com, 2020). Penolakan datang sejak awal, terutama dari serikat buruh (CNBC Indonesia, 2020), lalu meluas ke mahasiswa dan masyarakat sipil. Buruh menolak sejumlah pasal yang dinilai merugikan pekerja, seperti penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), pengurangan pesangon, dan kontrak kerja tanpa batas waktu (CNN Indonesia, 2020). Pembahasan tetap berjalan di tengah pandemi. Pada 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan RUU tersebut dalam rapat paripurna yang dipercepat dari jadwal semula 8 Oktober (Kompas.com, 2020).

Gelombang penolakan terhadap RUU Cipta Kerja terus berdatangan. Serikat buruh menyertai unjuk rasa dengan ancaman mogok kerja massal (CNBC Indonesia, 2020). Menjelang pengesahan, 32 federasi dan konfederasi buruh mengumumkan mogok nasional pada 6–8 Oktober 2020, yang diklaim melibatkan sekitar dua juta buruh di 25 provinsi (Kompas.com, 2020). Setelah pengesahan, unjuk rasa merebak di hampir seluruh daerah dan memuncak pada 8 Oktober 2020 (CNN Indonesia, 2020). Massa aksi di Jakarta yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan pelajar bergerak ke arah Istana. Aksi ini berujung ricuh. Massa melempari polisi, lalu merusak dan membakar 18 pos polisi dan 30 halte TransJakarta (Tempo, 2020).

Pemerintah memang merespons aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja meski tidak memenuhi tuntutan warga. Pembahasan klaster ketenagakerjaan sempat ditunda pada April 2020 setelah buruh mengancam berunjuk rasa (lihat bagian May Day), tetapi pembahasan kembali dilanjutkan. Menjelang aksi Oktober, pemerintah merespons dengan pembatasan sejak sebelum aksi digelar. Pada 2 Oktober 2020, Kapolri menerbitkan telegram yang menginstruksikan jajarannya meredam, melarang, dan menindak unjuk rasa serta mogok nasional (Tempo, 2020). Pada 8 Oktober, Polri menangkap 5.918 orang di seluruh Indonesia terkait penolakan UU Cipta Kerja (Kompas.com, 2020). Amnesty International kemudian mendokumentasikan 43 insiden kekerasan polisi terhadap demonstran (CNN Indonesia, 2020).

Meskipun sempat melunak, pemerintah kembali menegaskan posisinya dalam memberlakukan UU Cipta Kerja. Sehari setelah puncak aksi, Jokowi menyebut unjuk rasa dilatarbelakangi disinformasi dan hoaks, lalu mempersilakan pihak yang tidak puas untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Detikcom, 2020). Tuntutan pencabutan lewat Perppu tidak dijawab (Kompas.com, 2020) dan tetap disahkan sebagai UU No. 11 Tahun 2020.

Jalur MK yang ditawarkan pemerintah sempat membuahkan hasil. Pada 25 November 2021, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dan memberi waktu dua tahun untuk memperbaikinya (CNN Indonesia, 2021). Namun, alih-alih memperbaikinya lewat pembahasan ulang, pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 pada Desember 2022 (Kontan, 2022) yang kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang pada Maret 2023 (Kompas.com, 2023) dan diundangkan sebagai UU No. 6 Tahun 2023 (BPK, 2023).

Protes Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 (2020–2023)

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menjanjikan insentif bulanan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 dengan besaran hingga Rp15 juta untuk dokter spesialis (CNBC Indonesia, 2021). Dalam praktiknya, pencairan insentif kerap tersendat, terutama yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Banyak nakes tidak menerima insentif selama berbulan-bulan, sementara sebagian lain menerima di bawah ketentuan. Hingga Agustus 2021, realisasi insentif nakes daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) baru sekitar 21 persen dari anggaran

(Kompas.com, 2021). Situasi ini memicu protes nakes di berbagai daerah yang menuntut pencairan insentif sesuai ketentuan.

Protes ini bersifat lokal dan tersebar, tetapi muncul berulang di banyak daerah. Pada Mei 2020, 109 nakes honorer RSUD Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mogok kerja dan berunjuk rasa ke DPRD. Mereka menuntut kejelasan insentif, alat pelindung diri (APD), dan rumah singgah (Detikcom, 2020; Ombudsman RI, 2020). Pada Februari 2021, nakes RSUD Pirngadi Medan berunjuk rasa dan mengadu ke Ombudsman karena insentif mereka belum dibayar sejak Mei 2020 (Detikcom, 2021). Di Bengkulu, nakes RSUD M Yunus mengancam berhenti merawat pasien Covid-19 jika insentif tujuh bulan tidak cair dalam sebulan (Republika, 2021). Protes serupa berlanjut bahkan setelah pandemi mereda. Nakes di Sorong berunjuk rasa ke kantor wali kota pada Mei 2022 (Kompas.com, 2022). Aksi mogok kerja juga dilakukan nakes di RSUD Abepura, Jayapura yang berunjuk rasa berulang kali sejak Desember 2022 (Kompas.com, 2023).

Respons pemerintah daerah beragam. Bupati Ogan Ilir justru memecat ke-109 nakes tersebut, langkah yang kemudian dinilai Ombudsman mengarah pada maladministrasi (Ombudsman RI, 2020). Wali Kota Medan berjanji mencairkan insentif secara bertahap (Detikcom, 2021). Wali Kota Sorong mengganti direktur RSUD setelah tiga kali didemo (Kumparan, 2022). Namun, persoalan di Abepura berlangsung menahun karena manajemen rumah sakit dan pemerintah provinsi saling melempar tanggung jawab (Tribun Papua, 2022; Dinkes Papua, 2025).

Di tingkat pusat, isu insentif nakes sempat memanas. Pada Februari 2021, Kementerian Keuangan berencana memangkas besaran insentif hingga 50 persen (Kompas.com, 2021), meski akhirnya dibatalkan karena menuai protes dari Ikatan Dokter Indonesia dan DPR (Kompas.com, 2021). Menteri Dalam Negeri pun sempat menegur kepala daerah yang lamban mencairkan insentif nakes (Kompas.com, 2021; CNN Indonesia, 2021).

Aksi Penolakan Kenaikan UKT (2024)

Pada Januari 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menjadi acuan baru bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dalam menetapkan uang kuliah tunggal (UKT) (Detikcom, 2024). Banyak kampus kemudian menaikkan UKT dan iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa baru 2024, bahkan hingga lima kali lipat seperti yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) (CNN Indonesia, 2024). Sepanjang April hingga Mei 2024, mahasiswa di berbagai PTN memprotes kenaikan tersebut. Mereka menuntut pembatalan kenaikan UKT dan IPI di kampus masing-masing, sekaligus pencabutan peraturan yang menjadi dasarnya (Republika, 2024).

Protes yang utamanya berbasis kampus menyebar dari satu PTN ke PTN lain. Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat Unsoed di Purwokerto, Universitas Sumatra Utara (USU) di Medan, dan Universitas Riau (Unri) di Pekanbaru, lengkap dengan poster satir seperti wajah rektor berkacamata dolar (CNN Indonesia, 2024). Di Yogyakarta, mahasiswa UGM memanfaatkan Hari Pendidikan Nasional untuk berunjuk rasa di Balairung.

Mereka membawa survei yang menunjukkan 70 persen responden keberatan dengan besaran UKT (Tempo, 2024). Kritik juga menyebar lewat media sosial. Gelombang ini kemudian dibawa ke tingkat nasional ketika BEM Seluruh Indonesia mengadukannya ke Komisi X DPR pada 16 Mei dan mengancam turun ke jalan (Telisik, 2024).

Respons awal datang dari kampus dengan bentuk beragam. Unsoed membatalkan kenaikan (CNN Indonesia, 2024), sedangkan USU bersikukuh kenaikan sudah sesuai aturan (Tempo, 2024). UNY tidak mengakui mahasiswanya yang mengadu ke DPR sebagai representasi kampus (Metro TV, 2024). Rektor Unri bahkan melaporkan mahasiswanya ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, sebelum akhirnya mencabut laporan itu (Kompas.com, 2024). Respons kementerian justru memperkeruh suasana. Sekretaris Ditjen Dikti menyebut pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier yang bersifat pilihan sehingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode tersebut, Nadiem Makarim, dicecar dalam rapat kerja dengan Komisi X (CNN Indonesia, 2024). Pada 27 Mei, setelah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, Nadiem mengumumkan pembatalan kenaikan UKT tahun ajaran 2024/2025 di seluruh PTN. Namun, Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tidak dicabut, dan kampus masih dapat mengajukan kenaikan untuk tahun berikutnya (Detikcom, 2024).

#PeringatanDarurat – Penolakan RUU Pilkada (2024)

Pada 21 Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat kilat dan menyepakati revisi UU Pilkada yang mengabaikan Putusan MK terkait usia minimum calon peserta Pilkada (Kompas.com, 2024). Pilihan ini dinilai sarat kepentingan politik, terutama dengan berkembangnya wacana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, maju sebagai calon gubernur Jakarta atau Jawa Tengah. Merespons keputusan DPR, gambar Garuda biru "Peringatan Darurat" membanjiri media sosial (Kumparan, 2024). Publik menuntut DPR membatalkan revisi dan mematuhi putusan MK, serta mendesak KPU menerbitkan aturan pencalonan yang sesuai dengan putusan tersebut.

Sehari setelah rapat kilat tersebut, ribuan orang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, dan akademisi hingga komika memadati depan Gedung DPR (Tempo, 2024). Massa menjebol pagar kompleks parlemen, membakar ban, dan melempar botol ke halaman DPR (CNBC Indonesia, 2024). Aksi serupa merebak ke berbagai daerah yang diwarnai dengan perusakan fasilitas dan infrastruktur. Di Tasikmalaya, mahasiswa menduduki ruang paripurna DPRD dan membakar kursi di halaman gedung (Detikcom, 2024; iNews Tasikmalaya, 2024). Tak jauh berbeda, massa di Ambon dan Majene juga melampiaskan amarah dengan merusak properti di gedung DPRD (CNN Indonesia, 2024).

Tekanan ini berbuah cepat. Rapat paripurna pada pagi 22 Agustus batal karena hanya dihadiri 89 anggota DPR (Kompas.com, 2024). Sore harinya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan revisi UU Pilkada batal dan pencalonan kepala daerah akan mengikuti putusan MK (Tempo, 2024). Fraksi yang sebelumnya menyetujui revisi pun berbalik. Demokrat menarik diri dari pembahasan (Tempo, 2024), sementara PKS menyatakan mendukung pembatalan (Kumparan, 2024). Sehari kemudian, Koalisi Indonesia Maju

memastikan tidak akan mengusung Kaesang di Pilgub Jawa Tengah (CNBC Indonesia, 2024). Sejak 22 Agustus, KPU menyatakan tengah menyiapkan draf aturan pencalonan yang mengacu pada putusan MK (CNN Indonesia, 2024). Setelah berkonsultasi dengan Komisi II DPR, KPU menerbitkan PKPU No. 10 Tahun 2024 pada 25 Agustus (Kompas.com, 2024; Detikcom, 2024).

Di sisi lain, aksi protes terhadap RUU Pilkada ini direspons dengan represi. Polisi membubarkan massa dengan meriam air dan gas air mata. Polda Metro Jaya menangkap 301 orang, sebagian di antaranya pelajar yang dicegat dalam perjalanan menuju DPR (Tempo, 2024). YLBHI mencatat 31 demonstran di Bandung mengalami kekerasan aparat, sementara 18 orang di Semarang dilarikan ke rumah sakit (Tempo, 2024).

Protes Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen (2025)

Sejak 2020, dosen ASN di bawah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dikabarkan belum menerima tunjangan kinerja (tukin). Namun, unjuk rasa dosen memanas pada awal 2025 ketika Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyatakan anggaran tukin dosen mulai Januari 2025 tidak tersedia (Kompas.id, 2025). Salah satu alasan yang diungkapkan adalah adanya pergantian nomenklatur kementerian dan belum adanya Perpres untuk tukin (Kompas.com, 2025). Pernyataan ini memicu protes dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI). Mereka menuntut dua hal: pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020 hingga 2024 dan pembayaran tukin 2025 bagi seluruh dosen ASN tanpa terkecuali (Kompas.com, 2025).

Aksi damai digelar oleh warga terdampak, terutama dosen, dari berbagai daerah. ADAKSI memulai protesnya secara simbolik dengan mengirim karangan bunga bernada duka cita ke kantor Kemendiktisaintek pada 6 Januari 2025 (Tempo, 2025). Pada 3 Februari 2025, ratusan dosen dari berbagai daerah, dari Sumatra Barat hingga Papua, menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, tak jauh dari Istana. Dalam aksi itu, ADAKSI mengancam mogok nasional: seluruh dosen akan berhenti mengajar dan melayani mahasiswa (Kompas.com, 2025). Mogok itu akan dijalankan selepas Ramadan bila tuntutan mereka tetap diabaikan (Kompas.com, 2025).

Respons pemerintah datang bertahap. Pada akhir Januari, Kementerian Keuangan menyetujui anggaran Rp2,5 triliun untuk tukin pegawai ASN di lingkungan Kemendiktisaintek, termasuk dosen ASN periode tahun 2024 (CNN Indonesia, 2025). Namun, mereka menegaskan bahwa tukin yang terlewat tidak bisa dibayarkan karena pos anggarannya memang tidak pernah diajukan (CNN Indonesia, 2025). Pada Maret 2025, Presiden Prabowo meneken Perpres No. 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek yang mendasari pencairan tukin bagi 31.066 dosen ASN mulai Juli 2025 (Antara, 2025).

#IndonesiaGelap (2025)

Pada pertengahan Februari 2025, empat bulan setelah Prabowo Subianto dilantik, gelombang aksi bertajuk #IndonesiaGelap pecah di berbagai kota. Pemicu utamanya adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang memangkas APBN sekitar Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) (VOA Indonesia, 2025). Aksi yang dimotori oleh mahasiswa ini menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya cabut Inpres efisiensi, evaluasi program MBG, hingga penolakan dwifungsi TNI dan revisi UU TNI (Metro TV, 2025). Pada saat yang sama, kekecewaan anak muda terhadap negara meluap di media sosial lewat tagar #KaburAjaDulu, ajakan untuk mencari penghidupan di luar negeri (UGM, 2025).

Aksi dimulai serentak pada 17 Februari di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, Banjarmasin, Aceh, dan kota-kota lain (Tempo, 2025). Di Jakarta, mahasiswa berjalan kaki ke Patung Kuda dengan poster seperti "Kami butuh pendidikan gratis, bukan makan siang gratis" (Tempo, 2025). Sebagian massa membakar benda di depan barikade polisi bahkan melempari petasan hingga Molotov (Fajar, 2025; Tempo, 2025). Represi oleh aparat pun terjadi. Polisi mengadang rombongan mahasiswa Trisakti hingga terjadi kericuhan (Tempo, 2025). Di Ternate, dua jurnalis yang meliput aksi dianiaya anggota Satpol PP (Detikcom, 2025).

Respons pemerintah atas aksi #IndonesiaGelap umumnya mengabaikan tuntutan massa. Kekhawatiran soal dampak efisiensi terhadap dana pendidikan sudah terjawab ketika Menteri Keuangan menjamin keutuhan anggaran KIP Kuliah (Kemdiktisaintek, 2025). Namun, Inpres efisiensi tetap berjalan. Mensesneg Prasetyo Hadi menemui massa dan berjanji mempelajari tuntutan mereka (VOA Indonesia, 2025). Sebaliknya, pejabat lain menepis kritik. Luhut Pandjaitan menyebut "yang gelap kau, bukan Indonesia" (Antara, 2025). Prabowo menyatakan bahwa ia justru melihat Indonesia cerah (Tempo, 2025). Wamenaker menanggapi #KaburAjaDulu dengan mempersilakan warga pergi tanpa perlu kembali (Kompas.com, 2025). Tuntutan menolak revisi UU TNI pun diabaikan dan DPR justru mengesahkannya sebulan kemudian (Tempo, 2025).

Demonstrasi Penolakan RUU TNI (2025)

Tuntutan menolak revisi UU TNI yang diusung #IndonesiaGelap memuncak pada Maret 2025. Pada 14–15 Maret 2025, Panitia Kerja Komisi I DPR dan pemerintah menggelar rapat tertutup untuk membahas revisi tersebut di Hotel Fairmont, Jakarta, dengan target rampung sebelum masa reses (CNN Indonesia, 2025). Revisi itu memperluas jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif, menambah tugas operasi militer selain perang, dan memperpanjang usia pensiun. Masyarakat sipil dan mahasiswa menilai revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer sehingga menuntut pembahasannya dihentikan (Katadata, 2025).

Pada 15 Maret 2025, tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menerobos ruang rapat sambil membentangkan poster dan meminta rapat dihentikan. Salah satunya adalah Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus (CNN Indonesia, 2025). Ketika DPR menggelar paripurna pengesahan pada 20 Maret 2025, massa bertahan di

depan gedung DPR hingga malam. Mereka menarik pagar besi dengan tali tambang dan membongkar pagar beton (Detikcom, 2025).

Setelah pengesahan, aksi menyebar ke Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, hingga Kupang. Gedung DPRD di Yogyakarta dan Bandung turut menjadi sasaran amuk massa (Kompas, 2025). Di Malang, massa membakar ban dan kursi, lalu melempar batu dan bom molotov ke gedung DPRD hingga kaca pecah dan pos jaga terbakar (Detikcom, 2025; Kompas.com, 2025). Di Surabaya, massa melempari aparat dengan batu dan petasan di depan Gedung Negara Grahadi (Suara Surabaya, 2025).

Aksi pun diwarnai represi aparat. Aktivis yang menerobos rapat di Hotel Fairmont dilaporkan ke polisi oleh satpam hotel dan langsung dipanggil untuk klarifikasi (Kompas.com, 2025d). Kantor KontraS juga didatangi orang tak dikenal (Detikcom, 2025). Di Surabaya, polisi menangkap sekitar 25 orang dan mengintimidasi dua jurnalis (Kompas.com, 2025). Di Kupang, pegawai DPRD NTT memukuli demonstran (CNN Indonesia, 2025).

DPR dan pemerintah bergeming merespons penolakan terhadap RUU TNI. Sekjen DPR menyatakan rapat di hotel sesuai tata tertib karena bersifat mendesak (CNN Indonesia, 2025). Revisi UU TNI pun disahkan pada 20 Maret 2025 (Tempo, 2025). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi ini telah melalui berbagai tahapan dialog dan konsultasi dengan elemen masyarakat (DPR RI, 2025). Di sisi lain, Presiden Prabowo membantah revisi itu menghidupkan dwifungsi dan justru mempertanyakan motif aksi: “Murni apa dibayar? Harus objektif. Kita bukan anak kecil” (Merdeka, 2025).

Demonstrasi Agustus–September 2025–Tuntutan 17+8 (2025)

Pada Agustus 2025, kemarahan publik tersulut oleh terungkapnya tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan di tengah perekonomian yang kian sulit. Kemarahan itu diperparah oleh pernyataan dan aksi sejumlah anggota DPR yang dinilai merendahkan publik (Tempo, 2025). Gelombang demonstrasi dimulai di depan Gedung DPR pada 25 Agustus dan membesar pada 28 Agustus. Hari itu buruh berunjuk rasa lebih dulu, disusul mahasiswa dan pelajar yang menuntut pencabutan tunjangan hingga pembubaran DPR (Tempo, 2025). Di tengah eskalasi, tuntutan kemudian dirumuskan menjadi "17+8 Tuntutan Rakyat". Isinya mencakup pembekuan tunjangan DPR, investigasi independen atas kekerasan aparat, dan penarikan TNI dari pengamanan sipil, hingga reformasi DPR, partai politik, dan Polri (Kompas.com, 2025).

Titik balik aksi terjadi pada malam 28 Agustus 2025, ketika kendaraan taktis Brimob melindas pengemudi ojek *online* Affan Kurniawan hingga tewas. Malam itu juga, para pengemudi ojol mengepung Markas Brimob di Kwitang dan kemarahan meluas ke berbagai kota (Tempo, 2025). Pada 29–31 Agustus 2025, aksi berakhir ricuh. Massa membakar Gedung Negara Grahadi di Surabaya serta gedung DPRD di Makassar, Solo, Kediri, Kabupaten Cirebon, dan NTB (Kompas.com, 2025). Sedikitnya tujuh orang tewas pada 28–30 Agustus 2025, termasuk korban kebakaran gedung DPRD Makassar (Tempo, 2025). Pada 30–31 Agustus 2025, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dijarah massa (Tempo, 2025).

Pemerintah merespons dengan konsesi cepat. Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai mengumumkan pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri (Kompas.com, 2025). Pada saat yang sama, partai-partai menonaktifkan anggota DPR yang pernyataannya memicu kemarahan (Kompas.com, 2025). Dokumen 17+8 diserahkan ke DPR pada 4 September. Sehari kemudian, DPR mengumumkan enam keputusan, antara lain penghentian tunjangan perumahan dan pemangkasan sejumlah fasilitas anggota DPR dan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya (Kompas.com, 2025).

Menanggapi aksi demonstrasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan merespons sejumlah tuntutan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah dan DPR akan merespons positif tuntutan yang disuarakan rakyat, tapi tidak semua tuntutan diwujudkan karena memerlukan waktu (Detik.com, 2026). Selain menanggapi soal tuntutan 17+8, Yusril juga menekankan pentingnya proses hukum yang adil atas tragedi yang menimpa Affan Kurniawan (Nasional Kontan, 2026).

Selain Yusril, sejumlah pejabat ikut menanggapi tuntutan massa aksi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah mengakomodasi tuntutan soal PHK massal. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan pendemo sudah didengar Prabowo Subianto, tetapi tidak semua tuntutan bisa langsung dikabulkan. Di lain waktu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar rapat internal soal tuntutan 17+8 (Kompas.com, 2026).

Selanjutnya, DPR dan parpol juga merespons tuntutan demonstran. Anggota DPR RI, Andre Rosiade (Fraksi Partai Gerindra) dan Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDI-P) langsung menemui demonstran di depan Gerbang Pancasila DPR RI. Andre menyatakan agar perwakilan kolektif menyerahkan 17+8 tuntutan langsung kepada dirinya (Kompas.com, 2026). Sejumlah partai politik juga mengatakan akan siap mendalami dan berdialog terkait tuntutan 17+8. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah membaca soal 17+8 Tuntutan Rakyat. Beberapa ketua umum partai juga mengatakan siap mendorong tuntutan ke DPR dan mendukung apa yang disuarakan masyarakat (Kompas.com, 2026).

Respons pemerintah yang ekstensif ini dibersamai dengan represi besar-besaran terhadap massa aksi. Dalam konferensi pers yang sama, Prabowo menyebut sebagian aksi mengarah pada makar dan terorisme, lalu memerintahkan aparat bertindak tegas (Tempo, 2025k; Liputan6, 2025). Menurut Yusril, polisi sempat menangkap 6.719 orang dan hampir seribu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 295 anak (Tempo, 2025). Polisi juga menetapkan tiga aktivis sebagai tersangka penghasutan: Direktur Lokataru Delpedro Marhaen, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, dan mahasiswa Unri Khariq Anhar (Tempo, 2025).

Menuju Indonesia Bangkrut (2026)

Hampir sepuluh bulan setelah gelombang Agustus 2025, mahasiswa kembali turun ke jalan pada Juni 2026 dalam aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut". Aksi ini dimotori BEM Universitas Indonesia (UI). Pemicunya adalah kondisi ekonomi yang dinilai memburuk, mulai dari pelemahan rupiah hingga kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berlaku dua hari sebelumnya, di tengah sorotan atas program prioritas pemerintah (Beritasatu, 2026). Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek yang bergerak menuju Bundaran HI membawa lima tuntutan: (1) stop pemborosan APBN; (2) turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok; (3) hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; (4) hentikan militerisme di ranah sipil; dan (5) Presiden berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah (Tempo, 2026).

Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, mahasiswa sengaja tidak menyasar DPR maupun Istana. Bundaran HI dipilih sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pemerintah, sekaligus menyadarkan masyarakat luas akan kondisi negara karena lokasinya yang strategis sebagai pusat perekonomian ibu kota (Tempo, 2026). Ketika bus yang mengangkut ratusan mahasiswa UI dihentikan di *flyover* Semanggi, mereka memutuskan meninggalkan bus dan berjalan kaki menuju Bundaran HI (Tempo, 2026). Aksi berlangsung damai hingga malam hari (RM.id, 2026).

Respons pemerintah diawali dengan pembatasan. Sejak pagi, Polda Metro Jaya menyatakan Bundaran HI bukan tempat untuk menyampaikan aspirasi dan meminta massa pindah ke depan Gedung DPR atau Patung Kuda. Sebanyak 6.088 personel gabungan dikerahkan, termasuk 500 personel TNI (Humas Polri, 2026). Brimob menghadang bus mahasiswa di Semanggi (Tempo, 2026), sementara barikade TNI dan polisi menutup akses menuju Bundaran HI (Tempo, 2026). Aparat pun sempat memukul mundur demonstran akibat upaya massa aksi untuk menembus barikade (Tempo, 2026).

Daripada menerima tuntutan massa, pemerintah cenderung defensif. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menanggapi tuntutan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah sudah menjalankan efisiensi sejak awal dan kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan imbas kondisi global (Gebrak, 2026). Ia juga menegaskan MBG tidak akan dihentikan, melainkan dibenahi tata kelolanya (Tempo, 2026). Sepuluh hari kemudian, muncul unjuk rasa tandingan mendukung MBG di Monas. Badan Komunikasi membantah tudingan bahwa pemerintah menyetir aksi tersebut (Tempo, 2026).

Dengan atau Tanpa Ancaman: Spektrum *Voice* dalam Aksi Protes di Indonesia

Voice dengan Ancaman Exit yang Kredibel

Dari tiga belas aksi protes yang dianalisis, sembilan di antaranya teridentifikasi disertai ancaman *exit* yang kredibel (Lihat tabel 2). Sebagaimana diuraikan dalam kerangka konseptual, kredibilitas ancaman diukur dari dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan kepada negara dan kemungkinan *(possibility)* ancaman untuk benar-benar dilakukan (Clark dkk., 2012). Dalam sembilan aksi ini, massa tidak sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk menarik diri dari relasi dengan negara, bahkan menentangnya

secara terang-terangan. Ancaman tersebut setidaknya mengambil tiga bentuk: mogok kerja, perusakan fasilitas umum, dan ancaman migrasi. Bentuk ini pun tidak eksklusif di setiap demo sehingga satu aksi bisa saja mengadopsi lebih dari satu bentuk.

Mogok kerja ditemukan dalam aksi: demonstrasi pengemudi ojol, penolakan UU Cipta Kerja, protes insentif nakes, dan protes tukin dosen ASN. Dalam tiga aksi pertama, mogok tidak berhenti sebagai ancaman, tetapi benar-benar dijalankan. Pada aksi 205 tahun 2025, pengemudi ojol di berbagai kota menyerukan mematikan aplikasi secara serentak. Dalam penolakan UU Cipta Kerja, 32 federasi dan konfederasi buruh menggelar mogok kerja nasional pada 6–8 Oktober 2020 yang diklaim melibatkan sekitar dua juta buruh di 25 provinsi. Nakes juga sempat mogok, antara lain di RSUD Ogan Ilir pada 2020 dan RSUD Abepura pada 2022. Di daerah lain, mereka mengancam berhenti merawat pasien Covid-19 jika insentif tidak dicairkan. Adapun dalam protes tukin, mogok hadir sebagai ancaman dari para dosen. Aliansi dosen ASN (ADAKSI) menyatakan akan menghentikan kegiatan mengajar dan layanan kepada mahasiswa jika tukin tak kunjung dibayarkan.

Secara konseptual, mogok kerja dapat disandingkan dengan boikot. Hirschman (1970) menempatkan boikot di perbatasan antara *exit* dan *voice*. Konsumen yang memboikot memang berhenti menggunakan suatu produk, tetapi penghentian itu bersifat sementara dan bersyarat: boikot berakhir begitu tuntutan dipenuhi. Logika serupa berlaku pada mogok kerja. Buruh, tenaga kesehatan, dan dosen tidak meninggalkan negara, melainkan menarik kontribusinya untuk sementara waktu guna menekan negara agar memenuhi tuntutan. Karena itu, mogok kerja tidak dapat disamakan dengan *exit* dalam arti penuh, seperti berpindah kewarganegaraan. Mogok kerja tetap merupakan *voice* yang meminjam daya tekan *exit*.

Bentuk kedua, perusakan fasilitas umum terekam dalam sejumlah aksi: penolakan RUU KPK dan RKUHP (#ReformasiDikorupsi), penolakan UU Cipta Kerja, penolakan RUU Pilkada (#PeringatanDarurat), Aksi #IndonesiaGelap, penolakan RUU TNI, dan demonstrasi Agustus 2025 (penolakan tunjangan perumahan DPR).[§] Perusakan ini dilakukan dengan berbagai cara dan dalam derajat yang beragam (lihat Bab II). Sasaran mencakup halte dan stasiun, pos dan kendaraan milik aparat, hingga bangunan. Gedung parlemen, baik DPR di Jakarta maupun DPRD di daerah, menjadi sasaran yang paling sering ditemukan, mulai dari menjebol pagar, vandalisme dan perusakan fasilitas, pendudukan kantor, pembakaran hingga pelemparan molotov. Derajat paling ekstrem muncul dalam demonstrasi Agustus 2025 ketika gedung-gedung DPRD Dibakar hingga memakan korban dan rumah sejumlah pejabat negara (anggota DPR dan Menteri Keuangan) dijarah.

Bentuk kedua ini tidak secara gamblang terlihat sebagai *exit* sebagaimana dirumuskan oleh Hirschman (1970). Akan tetapi, perusakan fasilitas umum yang terjadi pada beberapa aksi protes ini memiliki pola yang sama, yakni menyasar simbol-simbol negara. Halte, stasiun, dan pos polisi merupakan wujud fisik layanan yang disediakan negara. Gedung parlemen

[§] Perusaakan simbol-simbol negara dilakukan dalam derajat yang beragam. Beberapa tindakan perusakan diduga sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin membuat demonstrasi menjadi rusuh.

merupakan simbol lembaga perwakilan rakyat. Adapun rumah pejabat merepresentasikan elite yang menjalankan kekuasaan negara.

Ireland (2021) menunjukkan bahwa hilangnya legitimasi negara di mata warga merupakan salah satu pendorong utama *exit.* Ketika negara tidak lagi dianggap berhak memerintah, warga berhenti menyalurkan keberatan melalui saluran yang tersedia dan beralih ke tindakan yang memintas sistem. Perusakan simbol-simbol negara pun mencerminkan gejala ini. Gedung parlemen terutama diserang dalam aksi yang menolak produk atau perilaku DPR, mulai dari RUU KPK dan RKUHP hingga tunjangan perumahan DPR. Dalam aksi-aksi itu, DPR bukan lagi diperlakukan sebagai saluran aspirasi, melainkan sebagai sasaran perlawanan. Pada demonstrasi Agustus 2025, sasaran perlawanan bahkan meluas dari lembaga ke individu yang dianggap mempersonifikasikan negara. Personifikasi serupa juga tambak pada aksi #IndonesiaGelap yang mengarahkan perlawanan mereka kepada aparat kepolisian sebagai wajah negara di lapangan. Meskipun gejala hilangnya legitimasi negara di mata warga telah terdeteksi, warga sejatinya masih belum benar-benar meninggalkan sistem. Perusakan simbol-simbol negara merupakan sinyal bahwa warga berada di ambang *exit*—dalam kajian ini, dikategorikan sebagai ancaman *exit,* alih-alih *exit* itu sendiri.

Bentuk ketiga, migrasi hanya terekam di demonstrasi Indonesia Gelap lewat tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial. Melalui tagar ini, publik meluapkan kekecewaan atas berbagai kebijakan kontroversial pemerintah dan menyatakan keinginan untuk mencari penghidupan di luar Indonesia. Dari ketiga bentuk tersebut, migrasi paling dekat dengan konsepsi *exit* yang diusulkan oleh Hirschman (1970) dalam konteks relasi warga dan negara, yakni meninggalkan negara itu sendiri.

***Voice* Tanpa Ancaman *Exit* yang Kredibel**

Empat aksi protes lainnya tidak teridentifikasi memiliki ancaman *exit* yang kredibel. Pada Aksi Kamisan, *May Day,* penolakan kenaikan UKT, dan Menuju Indonesia Bangkrut, tidak ditemukan bentuk *voice* yang mengisyaratkan kesediaan atau keinginan massa untuk keluar dari sistem. Aksi Kamisan merupakan contoh paling jelas. Selama hampir dua dekade keluarga korban dan simpatisan berdiri diam di depan Istana Negara setiap Kamis sore dengan pakaian serba hitam dan membubarkan diri menjelang petang. Lewat orasi, aksi teatrikal, hingga poster, mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. *May Day* juga tidak disertai ancaman *exit* yang kredibel. Pada 2020, serikat buruh membatalkan rencana aksi besar setelah bertemu Presiden Jokowi. Pada 2025–2026, sebagian konfederasi memilih merayakan May Day bersama Presiden Prabowo di Monas. Protes penolakan kenaikan UKT pun berlangsung di lingkungan kampus masing-masing tanpa ancaman untuk meninggalkan sistem.[**] Demikian pula aksi Menuju Indonesia Bangkrut.

[**] Aksi di Unsoed sempat diwarnai pemecahan kaca gedung rektorat. Namun, penulis tidak mengategorikannya sebagai ancaman *exit* berupa perusakan simbol negara. Insiden ini bersifat sporadis, dan sasarannya adalah pengelola kampus sebagai pihak yang menetapkan besaran UKT, bukan lembaga politik negara.

Meski membawa pesan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, aksi ini berlangsung damai dan massa tetap berjalan kaki menuju Bundaran HI ketika bus mereka dihentikan aparat.

Tabel 2 Ragam Bentuk Voice dalam 13 Aksi Protes Pasca-2019

No	Peristiwa	Tahun	Tuntutan	*Voice*	
				Dengan Ancaman Exit	*Tanpa Ancaman Exit*
1	Aksi Kamisan	2007–sekarang	Negara menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.		✓
2	Demonstrasi Pengemudi Ojol	2015–sekarang	1. Menaikkan batas tarif bawah; 2. Menurunkan potongan platform; dan 3. Menjamin perlindungan hukum bagi pekerja mitra.	✓	
3	May Day	2019 - sekarang	**2020:** 1. Tolak UU Cipta Kerja; 2. Stop PHK; dan 3. Liburkan buruh dengan upah dan THR penuh. **2025:** 1. Hapus sistem *outsourcing;* 2. Sahkan RUU PPRT; 3. Revisi UU Ketenagakerjaan; 4. Realisasi upah layak; 5. Sahkan RUU Perampasan Aset; dan 6. Bentuk satgas PHK.		✓
4	Penolakan RUU KPK dan RKUHP (#ReformasiDikorupsi)	2019	1. Tunda RKUHP; 2. Terbitkan Perppu, cabut UU KPK; 3. Tolak RUU Ketenagakerjaan; 4. Sahkan RUU Penghapusan KS; 5. Adili elite yang merusak lingkungan; dan 6. Hentikan penangkapan aktivis.	✓	
5	Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja	2020	Tolak pasal-pasal bermasalah di UU Cipta Kerja, antara lain penghapusan UMK, pengurangan pesangon, dan kontrak seumur hidup.	✓	
6	Protes Insentif Nakes Covid-19	2020–2023	1. Cairkan insentif Covid-19 yang tertunda; dan 2. Batalkan rencana pemotongan insentif Covid-19.	✓	
7	Penolakan Kenaikan UKT	2024	1. Tolak kenaikan UKT dan IPI; dan 2. Cabut Peraturan Mendikbudristek No. 2 Tahun 2024.		✓
8	Penolakan RUU Pilkada (#PeringatanDarurat)	2024	1. Membatalkan RUU Pilkada; dan 2. Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada.	✓	
9	Demonstrasi Tukin Dosen	2025	1. Bayar tukin dosen ASN yang tertunda sejak 2020; dan 2. Bayar tukin 2025 bagi seluruh dosen ASN.	✓	
10	#IndonesiaGelap	2025	1. Kaji ulang Inpres efisiensi anggaran; 2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat; 3. Evaluasi program MBG; 4. Tolak RUU Minerba; 5. Tolak dwifungsi TNI; 6. Sahkan RUU Perampasan Aset; 7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional; 8. Tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat; dan 9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.	✓	

11	Penolakan RUU TNI	2025	Menolak RUU TNI	✓	
12	Demo Agustus–September 2025	2025	Batalkan tunjangan perumahan DPR (yang kemudian berkembang menjadi 17+8 tuntutan)	✓	
13	Menuju Indonesia Bangkrut	2026	1. Stop pemborosan APBN; 2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; 3. Hentikan program MBG dan pembangunan; Koperasi Desa Merah Putih; 4. Hentikan militerisme di ranah sipil; dan 5. Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.		✓

Dari tiga belas aksi protes pasca-2019 yang dianalisis, sembilan disertai ancaman *exit* yang kredibel, sedangkan empat lainnya tidak. Ancaman *exit* dalam kesembilan aksi tersebut mengambil tiga bentuk. Bentuk pertama adalah mogok kerja, yang menyerupai boikot: warga menarik kontribusinya secara sementara dan bersyarat tanpa benar-benar meninggalkan negara. Ketiga bentuk ini tidak bersifat eksklusif; satu aksi dapat memuat lebih dari satu bentuk ancaman *exit*. Bentuk kedua adalah perusakan simbol-simbol negara yang mencerminkan penarikan pengakuan atas legitimasi lembaga yang diserang, terutama DPR meski belum berwujud *exit* yang sesungguhnya. Bentuk ketiga adalah migrasi, sebagaimana tampak dalam tagar #KaburAjaDulu, yang paling dekat dengan konsepsi *exit* Hirschman (1970) dalam relasi warga dan negara. Sebaliknya, Aksi Kamisan, May Day, penolakan kenaikan UKT, dan Menuju Indonesia Bangkrut berlangsung tanpa isyarat untuk keluar dari sistem. Aksi-aksi ini disuarakan secara damai, rutin, atau melalui jalur dialog dengan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa warga menyuarakan *voice* dengan derajat tekanan yang beragam, mulai dari aksi diam yang ritual hingga perusakan yang menantang legitimasi negara. Bagaimana negara merespons ragam *voice* tersebut menjadi pokok pembahasan bab berikutnya.

3

DIDENGAR ATAU DIABAIKAN: POLA RESPONS PEMERINTAH TERHADAP AKSI PROTES PASCA-2019



BAB III
DIDENGAR ATAU DIABAIKAN:
POLA RESPONS PEMERINTAH TERHADAP AKSI PROTES PASCA-2019

Tiga belas aksi protes yang dikaji berakhir dengan cara yang berbeda-beda. Ada aksi yang tuntutannya dipenuhi dalam hitungan jam, ada yang hanya dikabulkan sebagian, ada pula yang terus disuarakan selama bertahun-tahun tanpa jawaban. Bab ini berangkat dari keragaman tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua: bagaimana pemerintah merespons *voice* yang disuarakan dalam aksi-aksi protes pasca-2019? Respons pemerintah dibaca melalui sikapnya terhadap tuntutan utama setiap aksi, yaitu tuntutan yang pertama kali mendorong massa turun ke jalan, mengingat tuntutan kerap berkembang seiring memanasnya aksi. Namun, terjawabnya sebuah tuntutan tidak selalu berarti persoalannya tuntas. Beberapa jawaban terbukti hanya sementara dan sebagian lain tidak menyentuh akar persoalan.

Dari peta respons tersebut, bab ini kemudian menelusuri pola yang muncul: mengapa sebagian tuntutan dijawab sementara sebagian lain diabaikan, dan apa yang dapat dibaca darinya tentang relasi negara dan warga negara pasca-2019. Bab ini terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama memetakan sikap pemerintah terhadap tuntutan utama ke dalam tiga kategori, yakni menjawab penuh, menjawab sebagian, dan tidak menjawab. Bagian kedua menganalisis pola respons yang muncul dengan merujuk pada tipologi *voice* yang telah dipetakan pada bab sebelumnya.

Sikap Pemerintah terhadap Tuntutan Aksi: Tiga Corak Respons yang Muncul

Menjawab Penuh Tuntutan Utama

Dari tiga belas aksi yang dikaji, hanya tiga yang tuntutan utamanya dijawab penuh oleh pemerintah: protes insentif tenaga kesehatan, penolakan revisi UU Pilkada (#PeringatanDarurat), dan demonstrasi Agustus–September 2025. Ketiganya memiliki kesamaan, yakni disertai ancaman *exit* yang kredibel meski dalam bentuk yang berbeda. Seperti yang sudah diuraikan di bab II, dalam protes insentif Covid-19, nakes mengancam berhenti merawat pasien Covid-19 jika insentif mereka tidak kunjung dibayarkan. Pemerintah pusat merespons dengan dua langkah. Pertama, Kementerian Keuangan membatalkan rencana pemangkasan insentif. Kedua, Mendagri menegur kepala daerah yang lamban mencairkannya. Pemerintah daerah, selaku penanggung jawab penganggaran, kemudian mencairkan insentif secara bertahap. Dalam kasus ini, ancaman *exit* tampak jelas melalui ancaman mogok kerja oleh nakes, yang saat itu menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dalam aksi #PeringatanDarurat dan demonstrasi Agustus–September 2025, ancaman *exit* hadir dalam bentuk perusakan simbol-simbol negara. Aksi #PeringatanDarurat menuntut DPR membatalkan revisi UU Pilkada yang mengabaikan putusan MK. Tuntutan ini disuarakan disertai perusakan gedung parlemen, baik di Jakarta maupun di daerah (lihat Bab II). Pada hari puncak aksi, DPR mengumumkan pembatalan revisi tersebut. Fraksi-fraksi yang semula

mendukung revisi kemudian berbalik sikap. Selang tiga hari, KPU menerbitkan PKPU yang mengakomodasi putusan MK.

Pola serupa tampak pada demonstrasi Agustus–September 2025, yang menuntut pembatalan tunjangan perumahan DPR. Setelah aksi memanas akibat tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan, gedung DPRD di sejumlah daerah dibakar dan rumah beberapa pejabat dijarah. Presiden Prabowo segera mengumpulkan para ketua umum partai, lalu mengumumkan pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Partai-partai menonaktifkan kader yang pernyataannya memicu kemarahan publik dan DPR menerima dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat meski hanya menjawab sebagian isinya.

Menjawab Sebagian Tuntutan Utama

Terdapat empat aksi yang tuntutan utamanya dijawab sebagian oleh pemerintah: demonstrasi pengemudi ojol, tukin dosen ASN, *May Day* (2020 dan 2025–2026), dan penolakan kenaikan UKT. Keempat aksi ini memiliki pola *voice* yang berbeda. Demonstrasi pengemudi ojol dan protes tukin dosen ASN disertai ancaman *exit* yang kredibel, sedangkan *May Day* (2020 dan 2025–2026) dan penolakan kenaikan UKT tidak (lihat Bab II). Dalam kedua aksi pertama, ancaman *exit* hadir dalam bentuk mogok kerja. Pengemudi ojol menyerukan untuk mematikan aplikasi secara serentak dalam Aksi 205 tahun 2025, sementara dosen ASN mengancam berhenti mengajar jika tukin tidak kunjung cair.

Pemerintah merespons kedua aksi tersebut secara bertahap. Untuk tuntutan pengemudi ojol, DPR berkomitmen memasukkan undang-undang khusus transportasi *online* ke Prolegnas, dan Kemenhub menyetujui kenaikan tarif hingga 15 persen pada 2025. Setahun kemudian, Perpres No. 27 Tahun 2026 memangkas potongan aplikator menjadi maksimal 8 persen. Untuk tuntutan dosen ASN, Kementerian Keuangan menyetujui anggaran tukin pada Januari 2025, lalu Presiden menerbitkan Perpres No. 19 Tahun 2025 pada Maret sebagai dasar pencairannya. Namun, sejumlah tuntutan tetap tidak terjawab. Status hukum pengemudi ojol sebagai pekerja belum diatur dalam undang-undang, sedangkan tukin dosen ASN untuk periode 2020–2024 tidak pernah dibayarkan.

Berbeda dengan kedua aksi di atas, *May Day* (2020 dan 2025–2026) dan penolakan kenaikan UKT tidak disertai ancaman *exit* yang kredibel, tetapi tuntutannya tetap dijawab sebagian. Pada May Day 2020, pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ditunda setelah perwakilan buruh bertemu Presiden meski penundaan itu praktis dianulir ketika klaster tersebut disahkan bersama UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Sementara itu, dua dari enam tuntutan May Day 2025 dipenuhi meski dalam rentang waktu yang panjang. Pertama, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan pada 21 April 2026. Kedua, Satgas Mitigasi PHK dibentuk melalui Keppres No. 10 Tahun 2026 yang diumumkan pada May Day 2026. Sementara itu, penolakan kenaikan UKT dijawab dengan pembatalan kenaikan UKT tahun ajaran 2024/2025. Pembatalan ini diumumkan setelah Mendikbudristek Nadiem Makarim dicecar dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR dan dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Namun, Permendikbudristek 2/2024 yang menjadi dasar kenaikan tidak dicabut dan masih berlaku sehingga kemungkinan kenaikan UKT di tahun-tahun berikutnya tetap terbuka.

Tidak Menjawab Tuntutan Utama

Terdapat enam aksi dengan pola *voice* berbeda yang tuntutannya utamanya tidak dijawab oleh pemerintah. Empat di antaranya disertai ancaman *exit* yang kredibel: #ReformasiDikorupsi, penolakan UU Cipta Kerja, #IndonesiaGelap, dan penolakan revisi UU TNI. Ancaman tersebut hadir dalam bentuk perusakan simbol negara, mogok kerja (UU Cipta Kerja), dan wacana migrasi melalui #KaburAjaDulu (#IndonesiaGelap). Dua aksi lainnya, yakni Aksi Kamisan dan Menuju Indonesia Bangkrut, tidak disertai ancaman *exit* yang kredibel (lihat Bab II).

Dalam keempat aksi pertama, pemerintah tidak sekadar menolak tuntutan, tetapi juga melanjutkan kebijakan yang ditolak massa. Tuntutan utama #ReformasiDikorupsi adalah pencabutan revisi UU KPK yang disahkan pada September 2019 dan menjadi pemicu langsung aksi. Perppu untuk mencabutnya tidak pernah diterbitkan sehingga UU KPK hasil revisi tetap berlaku. Pengesahan RKUHP memang sempat ditunda, tetapi kemudian disahkan pada Desember 2022. Dalam penolakan UU Cipta Kerja, pengesahan justru dipercepat. Presiden kemudian mempersilakan pihak yang tidak puas menempuh uji materi ke MK. Ketika MK menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023. Dalam #IndonesiaGelap, Inpres efisiensi anggaran tetap berjalan dan revisi UU TNI yang turut ditolak massa bahkan disahkan sebulan kemudian. Dalam penolakan revisi UU TNI sendiri, DPR mengesahkan revisi tersebut di tengah gelombang aksi, sementara Presiden mempertanyakan apakah aksi penolakan itu murni atau dibayar.

Dalam kedua aksi tanpa ancaman *exit* yang kredibel, tuntutan juga tidak dijawab meski dengan cara berbeda. Aksi Kamisan menuntut penyelesaian yudisial atas pelanggaran HAM berat. Pemerintah justru menempuh jalur non-yudisial melalui pengakuan Presiden dan Inpres 2/2023. Di era Presiden Prabowo, tidak tercatat lagi interaksi pemerintah dengan peserta Aksi Kamisan. Dalam aksi Menuju Indonesia Bangkrut, Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi sudah dijalankan, kenaikan harga BBM merupakan imbas kondisi global, dan MBG tidak akan dihentikan.

Tabel 3 Respons Pemerintah terhadap Tuntutan Utama Aksi

Voice	**Sikap Pemerintah**		
	Tidak Menjawab	***Menjawab Sebagian***	***Menjawab Penuh***
With credible exit threat	1. Penolakan RUU KPK dan RKUHP (#ReformasiDikorupsi) 2. Penolakan UU Cipta Kerja 3. Demonstrasi #IndonesiaGelap 4. Penolakan RUU TNI	1. Demonstrasi Pengemudi Ojol 2. Demonstrasi Tukin Dosen ASN	1. Protes Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 2. Penolakan RUU Pilkada (#PeringatanDarurat) 3. Demonstrasi Agustus–September 2025
Without credible exit threat	1. Aksi Kamisan 2. Demonstrasi Menuju Indonesia Bangkrut	1. May Day 2020 dan 2025 2. Penolakan Kenaikan UKT	

Membaca Pola yang Muncul: Kapan dan Mengapa Pemerintah Merespons *Voice* Masyarakat

Temuan 1: Ancaman Exit dan Dependensi Negara

Clark dkk. (2012) berargumen bahwa negara cenderung merespons *voice* dalam dua kondisi: *voice* disertai ancaman *exit* yang kredibel dan negara bergantung pada kelompok yang menyuarakannya. Empat aksi dalam kajian ini menunjukkan pola yang sejalan dengan argumen tersebut, yakni protes insentif nakes, protes tukin dosen ASN, Aksi Kamisan, dan Menuju Indonesia Bangkrut.

Protes insentif nakes dan protes tukin dosen ASN menggambarkan kedua kondisi tersebut dengan jelas. Ancaman nakes untuk berhenti merawat pasien Covid-19 muncul ketika negara sangat bergantung pada mereka sebagai garda terdepan penanganan pandemi. Dependensi ini diakui di parlemen. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menekankan pengorbanan nakes yang mempertaruhkan nyawa dan bekerja sepanjang hari dengan APD. Ia pun meminta agar insentif mereka "jangan dikurangi" dan "harus dikembalikan" (Kompas.com, 2021). Sementara itu, ancaman dosen ASN untuk mogok mengajar dan menghentikan layanan kepada mahasiswa berpotensi mendisrupsi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peran strategis kedua profesi ini menempatkan negara dalam posisi bergantung (*dependent*) kepada mereka meski dalam derajat yang berbeda. Dampak ketidakhadiran nakes saat pandemi lebih mendesak jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dosen di ruang kelas. Perbedaan level dependensi ini yang menurut argumen Clark dkk., memengaruhi kualitas respons pemerintah.

Aksi Kamisan dan Menuju Indonesia Bangkrut mencerminkan kondisi sebaliknya. Ketika *voice* tidak disertai ancaman *exit* yang kredibel dan negara tidak bergantung pada kelompok yang menyuarakannya, negara cenderung mengabaikannya. Aksi Kamisan, misalnya, mengambil jalur aksi damai setiap Kamis sore tanpa disertai ancaman. Ketiadaan ancaman ini bukan hanya pilihan strategi, melainkan konsekuensi posisi peserta Kamisan. Tuntutan mereka, yakni penyelesaian yudisial atas pelanggaran HAM berat, hanya dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Akibatnya, *exit* dalam bentuk apa pun justru berarti melepaskan tuntutan tersebut. Negara pun tidak mengalami kerugian apabila mereka memilih *exit* sehingga negara berada dalam posisi otonom terhadap kelompok ini. Sejalan argument Clark dkk., negara tidak memenuhi tuntutan yudisial dan hanya menawarkan jalur non-yudisial yang tidak menyentuh inti tuntutan.

Aksi Menuju Indonesia Bangkrut menunjukkan pola yang sama melalui jalur berbeda. Secara profil, aksi ini serupa dengan #ReformasiDikorupsi dan #IndonesiaGelap: dimotori mahasiswa dan diikuti masyarakat luas. Pembedanya adalah ketiadaan ancaman *exit*. Aksi Menuju Indonesia Bangkrut berlangsung damai, tanpa mogok maupun perusakan simbol negara, dan ruang geraknya dibatasi aparat sejak sebelum aksi dimulai (Humas Polri, 2026; Tempo, 2026). Tuntutannya pun tidak dijawab. Perbandingan ini menunjukkan bahwa massa yang luas saja tidak cukup untuk menggugah respons negara tanpa disertai ancaman *exit* yang kredibel. Namun, #ReformasiDikorupsi dan #IndonesiaGelap yang disertai ancaman *exit* pun

tetap tidak dijawab. Artinya, aksi dengan massa publik luas tetap memerlukan ancaman *exit* yang kredibel meski belum tentu cukup.

Temuan 2: Pertemuan Kepentingan dan Konsolidasi Elite Politik

Sejumlah aksi menunjukkan bahwa ancaman *exit* yang kredibel dan dependensi negara belum cukup untuk menjelaskan respons pemerintah. #ReformasiDikorupsi, penolakan UU Cipta Kerja, #IndonesiaGelap, penolakan RUU TNI, #PeringatanDarurat, hingga demonstrasi Agustus–September 2025 memiliki profil serupa, tetapi menuai respons yang kontras (lihat tabel 3). Keenam aksi ini diikuti publik secara luas, memprotes kebijakan di tingkat nasional dengan semangat pro-demokrasi dan pro-rakyat, serta disertai ancaman *exit* kredibel berupa perusakan simbol-simbol negara. Oleh karena itu, tingkat dependensi negara dalam keenam aksi ini dapat diasumsikan relatif setara sehingga perbedaan respons pemerintah mungkin didorong oleh faktor lain. Analisis terhadap enam aksi menunjukkan dua faktor pembeda, yakni soliditas konsolidasi elite di pemerintahan dan ada atau tidaknya irisan kepentingan elite dan massa.

Faktor pertama adalah soliditas konsolidasi elite. Dalam empat aksi yang tuntutannya tidak dijawab, koalisi elite di pemerintah tetap solid. Pengesahan UU KPK dan Ciptaker, misalnya, disokong oleh dukungan yang solid di parlemen (Mietzner, 2024). Penolakan terhadap UU Ciptaker hanya datang dari fraksi PKS dan Demokrat yang saat itu merupakan oposisi minoritas di pemerintahan Jokowi. UU TNI dan Inpres efisiensi di era pemerintahan Prabowo juga tidak ditentang oleh parlemen. Dalam pengesahan UU TNI, PDI-P yang secara formal memosisikan diri sebagai oposisi, bahkan turut mendukung (lihat pernyataan Puan Maharani: DetikNews, 2025). Sebaliknya, konsolidasi elite retak dalam dua aksi yang tuntutannya dijawab. Dalam aksi #PeringatanDarurat, rapat paripurna gagal mencapai kuorum dan fraksi-fraksi yang semula mendukung revisi berbalik sikap (lihat Bab II). Sementara itu, demonstrasi Agustus–September 2025 berlangsung di tengah konflik antaroligarki yang menajam seiring disrupsi pemerintahan Prabowo terhadap jaringan patronase lama dan distribusi rente (Mudhoffir dkk., 2026).

Faktor kedua adalah irisan kepentingan antara elite dan massa. Dalam keempat aksi yang tidak dijawab, kebijakan yang ditolak massa justru merupakan produk koalisi elite itu sendiri. Sebaliknya, dalam #PeringatanDarurat, tuntutan massa untuk membatalkan RUU Pilkada versi DPR sejalan dengan kepentingan koalisi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang tidak berminat mengawali pemerintahannya dengan kebijakan kontroversial yang hanya menguntungkan pendahulunya (Mietzner, 2024). Dalam demonstrasi Agustus–September 2025, irisan itu tampak ketika Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai sendiri mengumumkan pencabutan tunjangan perumahan DPR (lihat Bab II).

Kedua faktor ini bekerja secara beriringan. Keretakan konsolidasi elite membuka celah di dalam tubuh pemerintah, sedangkan irisan kepentingan memberikan sebagian elite alasan untuk berpihak pada tuntutan massa. Temuan ini sejalan dengan argumen Mietzner (2024) soal pengaruh kolusi elite di Indonesia terhadap 'keberhasilan' aksi protes di Indonesia: *"Protests against the status quo have a chance to succeed only if there is an overlap between*

the interests of protesters and a large segment of the ruling elite." Menurut Mietzner, protes terhadap status quo berpeluang berhasil jika ada irisan antara kepentingan massa aksi dan kepentingan *"a large segment of the ruling elite."* Irisan kepentingan semacam ini bahkan dapat terbentuk di tengah aksi itu sendiri. Mudhoffir at al. (2026) menunjukkan bahwa eskalasi demonstrasi Agustus–September 2025 menciptakan ruang politik ekstra-institusional yang dikooptasi elite untuk memajukan kepentingan masing-masing. Dalam ruang inilah tuntutan massa dan kepentingan elite dapat bertemu. Dengan demikian, respons positif pemerintah terhadap tuntutan aksi—yang diikuti oleh massa publik luas—cenderung muncul ketika konsolidasi elite retak dan kepentingan sebagian elite bertemu dengan tuntutan massa.

Temuan 3: Ketepatan momentum dan tuntutan yang sepadan

Hasil analisis selanjutnya mengarah pada faktor ketepatan momentum dan transisi pemerintah yang akan berganti, menjadikan tuntutan lebih mungkin untuk dikabulkan. Demonstrasi protes kenaikan UKT dan aksi May Day tahun 2020 dan 2025 menjadi contoh ketika ketepatan momentum dikombinasikan dengan gerakan serta jenis tuntutan, memengaruhi keputusan pemerintah untuk mengabulkan tuntutan atau membatalkan kebijakan.

Kendati demikian, dikabulkannya tuntutan mahasiswa dalam protes kenaikan UKT hanya bersifat parsial. Pemerintah memang tidak menaikkan UKT di tahun 2024, tetapi juga tidak memenuhi tuntutan penting mahasiswa untuk mencabut Permendikbudristek No. 2/2024. Jokowi sendiri pada tahun akhir masa jabatannya mengatakan kenaikan UKT masih akan mungkin terjadi di tahun-tahun berikutnya (Tempo, 2024). Padahal, hasil evaluasi pemerintah menemukan bahwa kebijakan kenaikan UKT di tahun 2024 terlalu tinggi. Sementara itu, Kemendikbudristek akan membuka peluang bagi PTN untuk menaikkan biaya UKT yang tidak sampai memberatkan mahasiswa di tahun 2025 (BBC Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi hanya mengabulkan tuntutan di tahun 2024, tepat di tahun terakhir kepemimpinannya dan Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Ada dua kondisi pemungkin yang memengaruhi pembatalan kenaikan UKT 2024: (1) momentum politik dan (2) tuntutan yang berbiaya politik rendah yang cenderung bisa ditunda. Momentum itu adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi dan pernyataan Prabowo—yang saat itu sudah memenangi pemilu—untuk menekan UKT (Detikcom, 2024). Dalam kondisi tersebut, tuntutan yang bersifat dikabulkan sementara/parsial sangat mungkin dilakukan, alih-alih menghapuskan aturan utama (Permendikbudristek No. 2/2024).

Faktor selainnya adalah tuntutan untuk membatalkan kenaikan UKT merupakan tuntutan berbiaya politik rendah dan jangka pendek karena keputusannya langsung dari eksekutif. Ketika isu ini memicu gelombang protes mahasiswa yang masif pada pertengahan 2024, Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim langsung mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan tersebut setelah pertemuan di Istana Kepresidenan (Tempo, 2024). Pembatalan kenaikan UKT juga bersifat sementara dan berhasil meredam gejolak

demonstrasi meskipun tidak mengubah aturan dasar. Faktor yang tidak kalah penting adalah keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan elite inti, berbeda dengan kebijakan yang menyangkut militer atau kepentingan investasi seperti RUU KPK yang tetap disahkan meskipun didemo dalam momentum tahun politik.

May Day 2020 dan 2025 mendapatkan momentum yang berbeda. May day 2020 yang inti tuntutannya membatalkan RUU Cipta Kerja (spesifiknya pada klaster ketenagakerjaan), sempat berhasil menunda pengesahannya meski akhirnya tetap disahkan pada bulan Oktober 2020. Ada faktor momentum yang sangat berpengaruh di tahun 2020, yakni pandemi Covid-19.

Pada 24 April 2020, Jokowi memutuskan untuk menunda klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja mendapat kritik publik karena dilanjutkan di tengah pandemi (LBH Jakarta, 2021) meski Jokowi sendiri menyebut pemerintah sedang berfokus menangani wabah Covid-19 (Kompas.id, 2020). Kombinasi antara krisis eksternal dan prioritas dalam menangani wabah menjadi justifikasi bagi pemerintah saat itu untuk menunda pembahasan sementara waktu. Selain itu, aksi massa yang direncanakan akan dilaksanakan pada 30 April 2020 (Kompas.com, 2020) bertabrakan dengan kebijakan *physical distancing* pandemi Covid-19 sehingga aksi batal digelar.

May 2025 memiliki momentum yang berbeda. Pemenuhan sebagian tuntutan buruh pada awal pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai hasil pertemuan beberapa kondisi politik, bukan akibat satu momentum tunggal. Pertama, tingginya kepuasan publik pada kinerja tahun pertama pemerintahan baru Prabowo berkisar 79 sampai 81 persen pada survei 100 hari (Litbang Kompas, 2025). Namun, di balik angka kepuasan yang tinggi, pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik seperti daya beli masyarakat yang menurun (Katadata, 2025), hingga persoalan PHK massal yang juga terjadi sepanjang periode awal pemerintahan Prabowo (DetikNews, 2025). Ini menjadikan isu ketenagakerjaan merupakan titik lemah yang relevan dengan tuntutan buruh.

Analisis dalam bagian ini mengarah pada satu konklusi yaitu tekanan publik yang masif melalui demonstrasi akan sangat efektif ketika didorong oleh momentum yang tepat, baik itu situasi sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, perlu digarisbawahi bahwa demonstrasi warga tetap memiliki peran sentral dalam keseluruhan proses ini. Jenis tuntutan yang sepadan juga memengaruhi bagaimana pemerintah merespons tuntutan publik. Kebijakan kenaikan UKT yang dibatalkan menunjukkan bahwa selain momentumnya tepat (transisi pemerintahan), tuntutan dengan *cost* politik rendah cenderung mudah dikabulkan.

Warga yang Tidak Setara di Mata Negaranya: Relasi Indonesia dan Warganya Pasca-2019

Temuan-temuan di atas mengantarkan kita pada satu gambaran yang lebih utuh tentang relasi negara dan warga negara Indonesia pasca-2019. Relasi itu tidak bersifat seragam. Cara negara memandang dan merespons warganya bergantung pada siapa yang bersuara dan seberapa besar biaya yang harus ditanggung negara jika suara itu diabaikan.

Ketika negara berhadapan dengan kelompok yang bekerja di sektor-sektor strategis, seperti tenaga kesehatan dan dosen ASN, posisi tawar warga meningkat secara signifikan.

Negara bergantung pada kelompok ini untuk menjalankan layanan publik yang tidak mudah digantikan dalam jangka pendek. Dalam kondisi itu, ancaman *exit* yang kredibel—berupa mogok kerja—menempatkan negara pada posisi *dependent*. Negara perlu merespons agar roda layanan publik tidak berhenti. Relasi kuasa yang terbentuk, setidaknya dalam momen aksi, menjadi lebih setara dari biasanya.

Namun, gambaran yang berbeda muncul ketika yang bersuara adalah publik yang lebih luas, seperti mahasiswa, buruh, komunitas masyarakat sipil, atau apa yang Mietzner (2014) sebut sebagai *liberal minorities*. Terhadap kelompok ini, negara cenderung mengambil posisi *autonomous*. Negara tidak merasa cukup bergantung untuk merespons, bahkan ketika aksi berlangsung masif dan berulang. #ReformasiDikorupsi, penolakan UU Cipta Kerja, #IndonesiaGelap, dan penolakan RUU TNI berakhir tanpa pemenuhan tuntutan utama, meski melibatkan ratusan ribu massa di berbagai kota. Dua pengecualian yang ada, #PeringatanDarurat dan demonstrasi Agustus–September 2025, direspons bukan karena negara mendadak mendengar, melainkan karena ada faktor lain yang mengubah perhitungan, yakni ancaman *exit* yang meningkat menjadi tindakan destruktif serius dan/atau kepentingan elite yang kebetulan beririsan dengan tuntutan massa.

Pola ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak melihat seluruh warganya sebagai subjek dengan daya tawar yang setara. Kekuatan tawar-menawar antar-kelompok masyarakat berbeda dan perbedaan ini membentuk cara negara merespons. Kelompok yang bekerja di sektor-sektor vital negara memiliki manfaat (*leverage)* yang lebih nyata. Sebaliknya, kelompok yang menyuarakan kepentingan demokratis dan reformatif justru seringkali menghadapi benturan. Suara mereka baru didengar ketika ada tekanan yang mengancam stabilitas dalam arti yang lebih harfiah, misalnya kerusakan fisik, krisis kepercayaan elite, atau momen politik yang tidak menguntungkan pihak berkuasa.

Temuan ini menunjukkan karakter relasi Indonesia dan warganya pasca-2019. Indonesia cenderung bersifat *autonomous* terhadap sebagian besar warganya, tetapi *dependent* dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh kalkulasi kepentingan. Bagi gerakan masyarakat sipil, temuan ini membawa implikasi penting. Ancaman *exit* perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi dan bukan sekadar ekspresi frustrasi yang meledak sesaat. Pembacaan terhadap situasi politik, termasuk soal sejauh mana kepentingan elite dapat beririsan dengan kepentingan publik, menjadi krusial untuk menambah daya tawar massa di jalanan. Pada akhirnya, perbaikan relasi negara dan warga negara perlu dimulai dari menggeser kalkulasi negara atas posisi serta daya tawar rakyatnya.

4

PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Relasi Indonesia dan warga negaranya telah diwarnai berbagai tarik-ulur. Sejak #ReformasiDikorupsi pada 2019, jalanan kembali menjadi arena tempat warga menegosiasikan ulang kontrak sosialnya dengan negara. Kajian ini menunjukkan bahwa negosiasi tersebut disuarakan dengan derajat tekanan yang beragam. Dari 13 aksi protes yang dianalisis, sembilan disertai ancaman *exit* yang kredibel, dalam bentuk mogok kerja, perusakan simbol-simbol negara, dan wacana migrasi. Empat aksi lainnya berlangsung secara damai, rutin, atau melalui jalur dialog, tanpa isyarat untuk keluar dari sistem. Respons pemerintah terhadap ragam *voice* ini pun tidak seragam: tiga aksi dijawab penuh, empat dijawab sebagian, dan enam tidak dijawab. Tidak satu pun aksi tanpa ancaman *exit* yang kredibel memperoleh jawaban penuh. Namun, ancaman yang kredibel tidak selalu berbuah respons positif. Respons itu bergantung pada dua kondisi lain: seberapa besar negara bergantung pada kelompok yang bersuara, dan, ketika yang bersuara adalah publik luas, apakah konsolidasi elite sedang retak serta kepentingan sebagian elite beririsan dengan tuntutan massa.

Temuan ini menggambarkan relasi negara dan warga negara pasca-2019 yang timpang. Negara bersikap *dependent* terhadap kelompok yang menjalankan fungsi strategisnya, seperti tenaga kesehatan dan dosen ASN. Namun, negara cenderung *autonomous* terhadap publik luas yang menyuarakan tuntutan demokratis, kecuali ketika kalkulasi elite berubah. Dengan kata lain, renegosiasi kontrak sosial yang dibuka pada 2019 tidak berlangsung di antara pihak-pihak yang setara. Daya tawar warga tidak ditentukan oleh besarnya massa atau kuatnya tuntutan semata, tetapi oleh posisi mereka di hadapan negara dan elite yang menguasainya. Selama kalkulasi ini tidak bergeser, *voice* warga akan terus lebih mudah diabaikan daripada didengar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

Jaffrey, S., & Warburton, E. (Eds.). (2025). *The Jokowi presidency: Indonesia's decade of authoritarian revival*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Jurnal:

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian politics in 2014: Democracy's close call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 50*(3), 347–369. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980375

Clark, W. R., Golder, M., & Golder, S. N. (2012). *An exit, voice and loyalty model of politics*. https://publics22.classes.ryansafner.com/readings/Clark-Golder-2012.pdf

Hadiz, V. R. *Retrieving the Past for the Future? Indonesia and the New Order Legacy* | JSTOR. Southeast Asian Journal of Social Science, 11. https://doi.org/24492956

Ireland, Leanna. (2021). *The (Non)normative Administration of Justice by the Crowd: An Adaptation and Application of Hirschman's Exit, Voice and Loyalty Framework*. VTechWorks. http://hdl.handle.net/10919/112975

Karim, A.G. (2020). *Menegosiasi ulang Indonesia*. Yogyakarta: IRCISOD.

Mardianti, E. (2022). *Gerakan mahasiswa dalam pusaran tiga orde kekuasaan: Antara gerakan moralis atau gerakan politis*. Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2(2), 82–103. https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103

Mietzner, M. (2024). *Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement*. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 712(1), pages 223-234, March*. https://doi.org/10.1177/00027162241309436

Mudhoffir, A. M., [dkk.]. (2026). *Riots, ruptures and power contests under Prabowo. Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 0(0). https://doi.org/10.1177/18681034261495053

Sastramidjaja, Y. (2020). *Indonesia: digital communications energising new political generation's campaign for democracy*. SEALionPLUS, accessed 06/11/2026, https://sealionplus.iseas.edu.sg/nodes/view/25055

Savirani, A. (2023). *University curricula and student movement in Indonesia: "Gejayan Memanggil" protest in Yogyakarta*. Journal of Governance, 8(3), 367-383. https://doi.org/10.31506/jog.v8i3.20904

Sharp, E. B. (1984). Exit, voice, and loyalty in the context of local government problems. *Western Political Quarterly, 37*(1), 67–83. https://www.jstor.org/stable/448326

Yasih, D. W. P. (2023). *Normalizing and resisting the new precarity: A case study of the Indonesian gig economy*. Critical Sociology, 49(4-5), 847-863. https://doi.org/10.1177/08969205221087130

Yudistira, A., & Husodo, P. (2022). *Jalan Panjang Pencarian Keadilan: Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021*. Jurnal Ceteris Paribus, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.25077/jcp.v1i2.8

Situs web:

Antara. (2020). *Ada apa selama setahun UU KPK versi revisi*. https://www.antaranews.com/berita/1788981/ada-apa-selama-setahun-uu-kpk-versi-revisi

Antara. (2025a). *Besaran tukin dosen ASN yang cair Juli 2025 cek rinciannya*. https://www.antaranews.com/berita/4790545/besaran-tukin-dosen-asn-yang-cair-juli-2025-cek-rinciannya

Antara. (2025b). *Luhut tanggapi aksi Indonesia gelap*. https://www.antaranews.com/berita/4660201/luhut-tanggapi-aksi-indonesia-gelap

Antara. (2025c). *Tuntutan regulasi baru ojol cermin gig economy di ujung revolusi*. https://gorontalo.antaranews.com/berita/300913/tuntutan-regulasi-baru-ojol-cermin-gig-economy-di-ujung-revolusi

BBC News Indonesia. (2016). *Indonesia rekonsiliasi nonyudisial*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160105_indonesia_rekonsiliasi_nonyudisial

BBC News Indonesia. (2017). *Kontras dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM tolak solusi nonyudisial*. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38811327

BBC News Indonesia. (2025). *Pengemudi ojol demo, padamkan aplikasi – Apa hasil audiensi dengan pemerintah?* https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj425z82x47o

Beritasatu. (2026). *Demo menuju Indonesia bangkrut ketika persepsi krisis bertemu realitas ekonomi*. https://www.beritasatu.com/nasional/3001940/demo-menuju-indonesia-bangkrut-ketika-persepsi-krisis-bertemu-realitas-ekonomi

CNA Indonesia. (2026). *Potongan aplikator ojol 8 persen Perpres Prabowo*. https://www.cna.id/indonesia/potongan-aplikator-ojol-8-persen-perpres-prabowo-46811

CNBC Indonesia. (2020, 18 Januari). *Pak Jokowi Omnibus Law disahkan buruh ancam mogok massal*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200118181257-4-131012/pak-jokowi-omnibus-law-disahkan-buruh-ancam-mogok-massal

CNBC Indonesia. (2021, 5 Februari). *Cerita lengkap rencana insentif nakes yang batal disunat*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205090145-4-221218/cerita-lengkap-rencana-insentif-nakes-yang-batal-disunat

CNBC Indonesia. (2024a, 22 Agustus). *Detik detik pagar depan belakang gedung DPR dirobohkan massa*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240822161231-7-565569/detik-detik-pagar-depan-belakang-gedung-dpr-dirobohkan-massa

CNBC Indonesia. (2024b, 24 Agustus). *Gerindra cs batal usung Kaesang di Pilgub Jateng hingga respons Jokowi*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240824055418-4-566024/gerindra-cs-batal-usung-kaesang-di-pilgub-jateng-hingga-respons-jokowi

CNBC Indonesia. (2025, 30 Juni). *Kemenhub kasih restu tarif ojek online bakal naik sampai 15*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250630171430-4-645022/kemenhub-kasih-restu-tarif-ojek-online-bakal-naik-sampai-15

CNN Indonesia. (2019a, 18 Oktober). *Jokowi disebut tak tandatangani UU KPK baru*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018125717-20-440651/jokowi-disebut-tak-tandatangani-uu-kpk-baru

CNN Indonesia. (2019b, 20 September). *Jokowi minta pengesahan RKUHP ditunda*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920143637-12-432277/jokowi-minta-pengesahan-rkuhp-ditunda

CNN Indonesia. (2019c, 26 Maret). *Ketika driver ojol masih berharap tarif lebih tinggi lagi*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326071756-20-380657/ketika-driver-ojol-masih-berharap-tarif-lebih-tinggi-lagi

CNN Indonesia. (2020a, 9 Oktober). *Aksi tolak UU Ciptaker vs tuduhan soal demo ditunggangi*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009145215-20-556560/aksi-tolak-uu-ciptaker-vs-tuduhan-soal-demo-ditunggangi

CNN Indonesia. (2020b, 2 Desember). *Amnesty ungkap 43 video kekerasan polisi di demo UU Ciptaker*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201202144029-20-577113/amnesty-ungkap-43-video-kekerasan-polisi-di-demo-uu-ciptaker

CNN Indonesia. (2020c, 6 Oktober). *Tolak Omnibus Law jutaan buruh ancam mogok hari ini*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006084713-20-554770/tolak-omnibus-law-jutaan-buruh-ancam-mogok-hari-ini

CNN Indonesia. (2021a, 31 Agustus). *Tito tegur 10 kepala daerah belum membayar insentif nakes*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831110454-20-687707/tito-tegur-10-kepala-daerah-belum-membayar-insentif-nakes

CNN Indonesia. (2021b, 26 November). *UU Cipta Kerja dicap inkonstitusional bersyarat*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126070036-12-726264/uu-cipta-kerja-dicap-inkonstitusional-bersyarat

CNN Indonesia. (2024a, 22 Agustus). *Demo tolak RUU Pilkada di Ambon ricuh massa lempari kaca gedung DPRD*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822141412-20-1136223/demo-tolak-ruu-pilkada-di-ambon-ricuh-massa-lempari-kaca-gedung-dprd

CNN Indonesia. (2024b, 23 Agustus). *Duduki kantor DPRD Majene massa pedemo rusak dan pecahkan fasilitas*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240823191934-20-1136860/duduki-kantor-dprd-majene-massa-pedemo-rusak-dan-pecahkan-fasilitas

CNN Indonesia. (2024c, 21 Mei). *Kemendikbud klarifikasi soal kuliah cuma kebutuhan tersier*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521135828-20-1100388/kemendikbud-klarifikasi-soal-kuliah-cuma-kebutuhan-tersier

CNN Indonesia. (2024d, 22 Agustus). *KPU siapkan draf PKPU syarat pencalonan Pilkada mengacu putusan MK*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822165049-

617-1136317/kpu-siapkan-draf-pkpu-syarat-pencalonan-pilkada-mengacu-putusan-mk

CNN Indonesia. (2024e, 9 Mei). *UKT naik picu gelombang protes mahasiswa di USU UNRI dan UNSOED*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240509115852-20-1095728/ukt-naik-picu-gelombang-protes-mahasiswa-di-usu-unri-dan-unsoed

CNN Indonesia. (2025a, 16 Maret). *Aksi geruduk rapat RUU TNI di hotel Fairmont dilaporkan ke polisi*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316130906-12-1209390/aksi-geruduk-rapat-ruu-tni-di-hotel-fairmont-dilaporkan-ke-polisi

CNN Indonesia. (2025b, 25 Maret). *Gelombang aksi protes UU TNI di daerah Surabaya hingga Kupang*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250325061810-20-1212616/gelombang-aksi-protes-uu-tni-di-daerah-surabaya-hingga-kupang

CNN Indonesia. (2025c, 30 Januari). *Kemendikti tak bisa beri tukin dosen ASN 2020–2024 janji bayar 2025*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250130092840-20-1192601/kemendikti-tak-bisa-beri-tukin-dosen-asn-2020-2024-janji-bayar-2025

CNN Indonesia. (2025d, 16 Maret). *Sekjen DPR soal rapat RUU TNI di hotel urgensi ada government rate*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316060028-20-1209317/sekjen-dpr-soal-rapat-ruu-tni-di-hotel-urgensi-ada-government-rate

Detikcom. (2019). *2019 tahunnya aksi massa mahasiswa pelajar demo di mana mana*. https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana

Detikcom. (2020a). *Duduk perkara 109 nakes Ogan Ilir dipecat karena tolak tangani corona*. https://news.detik.com/berita/d-5024214/duduk-perkara-109-nakes-ogan-ilir-dipecat-karena-tolak-tangani-corona

Detikcom. (2020b). *Jokowi jika tidak puas UU Cipta Kerja silakan ajukan ke MK*. https://news.detik.com/berita/d-5207355/jokowi-jika-tidak-puas-uu-cipta-kerja-silakan-ajukan-ke-mk

Detikcom. (2021a). *Insentif belum dibayar nakes RS Pirngadi Medan ngadu ke Ombudsman Sumut*. https://news.detik.com/berita/d-5377289/insentif-belum-dibayar-nakes-rs-pirngadi-medan-ngadu-ke-ombudsman-sumut

Detikcom. (2021b). *Nakes di RS Pirngadi sempat demo Bobby janji insentif cair pekan depan*. https://news.detik.com/berita/d-5479301/nakes-di-rs-pirngadi-sempat-demo-bobby-janji-insentif-cair-pekan-depan

Detikcom. (2024a). *Batalnya kenaikan UKT tahun ini usai Nadiem dipanggil Jokowi*. https://news.detik.com/berita/d-7360768/batalnya-kenaikan-ukt-tahun-ini-usai-nadiem-dipanggil-jokowi

Detikcom. (2024b). *PKPU nomor 10 tahun 2024 isi pasal perubahan dan link unduh*. https://news.detik.com/pilkada/d-7508797/pkpu-nomor-10-tahun-2024-isi-pasal-perubahan-dan-link-unduh

Detikcom. (2024c). *Prabowo ingin ringankan UKT PTN kalau bisa sangat minim atau gratis*. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7356029/prabowo-ingin-ringankan-ukt-ptn-kalau-bisa-sangat-minim-atau-gratis

Detikcom. (2024d). *Ruang paripurna DPRD kota Tasikmalaya porak poranda diduduki demonstran*. https://www.detik.com/jabar/berita/d-7503511/ruang-paripurna-dprd-kota-tasikmalaya-porak-poranda-diduduki-demonstran

Detikcom. (2024e). *Usai dipanggil Jokowi Mendikbudristek Nadiem nyatakan batalkan kenaikan UKT*. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7359840/usai-dipanggil-jokowi-mendikbudristek-nadiem-nyatakan-batalkan-kenaikan-ukt

Detikcom. (2025a). *2 jurnalis di Ternate diduga dianiaya oknum Satpol PP saat liput demo*. https://news.detik.com/berita/d-7793298/2-jurnalis-di-ternate-diduga-dianiaya-oknum-satpol-pp-saat-liput-demo

Detikcom. (2025b). *Demo tolak UU TNI di kota Malang ricuh massa bakar ban depan gedung DPRD*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-7837843/demo-tolak-uu-tni-di-kota-malang-ricuh-massa-bakar-ban-depan-gedung-dprd

Detikcom. (2025c). *Massa aksi tolak RUU TNI masih bertahan di depan DPR*. https://news.detik.com/berita/d-7833537/massa-aksi-tolak-ruu-tni-masih-bertahan-di-depan-dpr

Detikcom. (2025d). *Penggerudukan rapat RUU TNI di Fairmont berujung laporan ke polisi*. https://news.detik.com/berita/d-7826588/penggerudukan-rapat-ruu-tni-di-fairmont-berujung-laporan-ke-polisi

Detikcom. (2026). *Pemerintah gelar rakor tingkat kementerian bahas 17+8 tuntutan rakyat*. https://news.detik.com/berita/d-8101241/pemerintah-gelar-rakor-tingkat-kementerian-bahas-17-8-tuntutan-rakyat

DetikFinance. (2026). *Prabowo pangkas potongan aplikator ojol jadi 8 ini respons Gojek dan Grab*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8470506/prabowo-pangkas-potongan-aplikator-ojol-jadi-8-ini-respons-gojek-dan-grab

DetikNews. (2016). *Ratusan sopir angkutan online demo di DPR*. https://news.detik.com/berita/d-3280646/ratusan-sopir-angkutan-online-demo-di-dpr

DetikNews. (2022). *Aliansi ojol aksi jahit mulut Kemenhub jelaskan soal kenaikan tarif*. https://news.detik.com/berita/d-6202485/aliansi-ojol-aksi-jahit-mulut-kemenhub-jelaskan-soal-kenaikan-tarif

DetikNews. (2025a). *Puan jawab sorotan komisi i DPR rapat RUU TNI di hotel Fairmont*. https://news.detik.com/berita/d-7827559/puan-jawab-sorotan-komisi-i-dpr-rapat-ruu-tni-di-hotel-fairmont

DetikNews. (2025b). *Badai-PHK-Massal-Awal-Era-Prabowo*. https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20250318/Badai-PHK-Massal-Awal-Era-Prabowo/

Dinkes Papua. (2025). *109 nakes RSUD Abepura tuntut insentif Covid-19 gubernur Papua tegaskan direktur bertanggung jawab*. https://dinkes.papua.go.id/berita/109-nakes-rsud-abepura-tuntut-insentif-covid-19-gubernur-papua-tegaskan-direktur-bertanggung-jawab

DPR RI. (2025). *DPR sahkan revisi UU TNI Dasco supremasi sipil tetap dikedepankan*. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Sahkan-Revisi-UU-TNI-Dasco-Supremasi-Sipil-Tetap-Dikedepankan-55026

Fajar. (2025, 20 Februari). *Mahasiswa gelar aksi Indonesia gelap di patung kuda kritik efisiensi anggaran*. https://fajar.co.id/2025/02/20/mahasiswa-gelar-aksi-indonesia-gelap-di-patung-kuda-kritik-efisiensi-anggaran/

Gebrak. (2026). *Istana bantah pemborosan demi efisiensi*. https://www.gebrak.id/2026/06/istana-bantah-pemborosan-demi-efisiensi.html

Hukumonline. (2023). *Upaya pemerintah pasca pengesahan KUHP baru*. https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/

Humas Polri. (2026). *Polda metro jaya siapkan 6088 personel kapolda ingatkan aksi mahasiswa dilayani humanis*. https://humas.polri.go.id/news/detail/2420190-polda-metro-jaya-siapkan-6088-personel-kapolda-ingatkan-aksi-mahasiswa-dilayani-humanis

iNews Tasikmalaya. (2024). *Demo mahasiswa tolak RUU Pilkada 2024 di Tasikmalaya ricuh sejumlah fasilitas gedung DPRD rusak*. https://tasikmalaya.inews.id/read/483674/demo-mahasiswa-tolak-ruu-pilkada-2024-di-tasikmalaya-ricuh-sejumlah-fasilitas-gedung-dprd-rusak

InfoPublik. (2026). *Dari aksi ke aspirasi May Day 2026 di Monas jadi ruang dialog buruh dan pemerintah*. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/968507/dari-aksi-ke-aspirasi-may-day-2026-di-monas-jadi-ruang-dialog-buruh-dan-pemerintah

Jawa Pos. (2019). *Kaleidoskop 2019 kerusuhan demo hingga korban meninggal dunia*. https://www.jawapos.com/kasuistika/1912280004/kaleidoskop-2019-kerusuhan-demo-hingga-korban-meninggal-dunia

Katadata. (2024). *Detail aturan baru ojol yang masih dikaji Kemnaker diteken era Prabowo Gibran*. https://katadata.co.id/digital/startup/66d18b712b36b/detail-aturan-baru-ojol-yang-masih-dikaji-kemnaker-diteken-era-prabowo-gibran

Katadata. (2025a). *Aktivis yang geruduk rapat RUU TNI di hotel Fairmont dilaporkan ke polisi*. https://katadata.co.id/berita/nasional/67d6a8f323689/aktivis-yang-geruduk-rapat-ruu-tni-di-hotel-fairmont-dilaporkan-ke-polisi

Katadata. (2025b). *Tantangan ekonomi 100 hari Prabowo PHK pelemahan daya beli dan tekanan fiskal*. https://katadata.co.id/finansial/makro/679b6df0052df/tantangan-ekonomi-100-hari-prabowo-phk-pelemahan-daya-beli-dan-tekanan-fiskal

Kemdiktisaintek. (2025). *Program beasiswa kartu Indonesia pintar kuliah KIP-K tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran*. https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/program-beasiswa-kartu-indonesia-pintar-kuliah-kip-k-tetap-berjalan-tanpa-pengurangan-anggaran

Kompas.com. (2019a, 30 September). *DPR sepakat tunda pengesahan RKUHP dan 4 RUU lainnya*. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/30/13224901/dpr-sepakat-tunda-pengesahan-rkuhp-dan-4-ruu-lainnya

Kompas.com. (2019b, 23 September). *Ini 7 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi gejayanmemanggil*. https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/084331165/ini-7-tuntutan-yang-akan-disampaikan-dalam-aksi-gejayanmemanggil

Kompas.com. (2019c, 7 Oktober). *Jokowi di antara tekanan terbitkan Perppu KPK dan narasi pemakzulan*. https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/07/052200265/jokowi-di-antara-tekanan-terbitkan-perppu-kpk-dan-narasi-pemakzulan

Kompas.com. (2020a, 13 Februari). *Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan diunggah ke situs DPR*. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/19015281/draf-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-tidak-akan-diunggah-ke-situs-dpr

Kompas.com. (2020b, 30 April). *May Day KSPI akan kampanye virtual suarakan 3 isu buruh*. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/15074871/may-day-kspi-akan-kampanye-virtual-suarakan-3-isu-buruh

Kompas.com. (2020c, 10 Oktober). *Polisi total amankan 5918 orang dalam demo tolak UU Cipta Kerja*. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/15155481/polisi-total-amankan-5918-orang-dalam-demo-tolak-uu-cipta-kerja

Kompas.com. (2020d, 21 April). *Rencana aksi buruh saat wabah Covid-19 sesuai protokol hingga tolak RUU*. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/09573171/rencana-aksi-buruh-saat-wabah-covid-19-sesuai-protokol-hingga-tolak-ruu

Kompas.com. (2020e, 6 Oktober). *Saat DPR percepat pengesahan RUU Cipta Kerja dan abaikan suara rakyat*. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/06590411/saat-dpr-percepat-pengesahan-ruu-cipta-kerja-dan-abaikan-suara-rakyat

Kompas.com. (2020f, 20 Oktober). *Setahun Jokowi dan pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja

Kompas.com. (2021a, 4 Februari). *Dipangkas hingga 50 persen ini rincian insentif Covid-19 untuk tenaga*. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/15082331/dipangkas-hingga-50-persen-ini-rincian-insentif-covid-19-untuk-tenaga

Kompas.com. (2021b, 14 Agustus). *Kesal insentif nakes RSUD belum cair gubernur Jambi ancam dirut kamu saya*. https://regional.kompas.com/read/2021/08/14/074023878/kesal-insentif-nakes-rsud-belum-cair-gubernur-jambi-ancam-dirut-kamu-saya

Kompas.com. (2021c, 18 Juli). *Mendagri tegur keras 19 kepala daerah terkait dana penanganan Covid-19*. https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/180523065/mendagri-tegur-keras-19-kepala-daerah-terkait-dana-penanganan-covid-19

Kompas.com. (2021d, 5 Februari). *Tolong jangan dikurangi insentif mereka*. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/05/07360771/tolong-jangan-dikurangi-insentif-mereka

Kompas.com. (2022, 24 Mei). *Insentif Covid-19 belum dibayar sejumlah nakes demo di kantor wali kota*. https://regional.kompas.com/read/2022/05/24/165217478/insentif-covid-19-belum-dibayar-sejumlah-nakes-demo-di-kantor-wali-kota

Kompas.com. (2023a, 21 Maret). *DPR sahkan Perppu Cipta Kerja jadi UU Demokrat interupsi PKS walkout*. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/11013191/dpr-sahkan-perppu-cipta-kerja-jadi-uu-demokrat-interupsi-pks-walkout

Kompas.com. (2023b, 11 Agustus). *Nakes RSUD Abepura Jayapura demo tuntut pembayaran insentif Covid-19*. https://regional.kompas.com/read/2023/08/11/132627478/nakes-rsud-abepura-jayapura-demo-tuntut-pembayaran-insentif-covid-19

Kompas.com. (2024a, 21 Agustus). *DPR manut MA dan tolak MK soal usia cagub angin segar untuk Kaesang*. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/14482171/dpr-manut-ma-dan-tolak-mk-soal-usia-cagub-angin-segar-untuk-kaesang

Kompas.com. (2024b, 10 Mei). *Duduk perkara rektor UNRI polisikan mahasiswa yang protes UKT berakhir*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/10/080000165/duduk-perkara-rektor-unri-polisikan-mahasiswa-yang-protes-ukt-berakhir

Kompas.com. (2024c, 2 Maret). *Kekecewaan Sumarsih kepada Jokowi urungkan niatnya berhenti aksi Kamisan*. https://nasional.kompas.com/read/2024/03/02/08354971/kekecewaan-sumarsih-kepada-jokowi-urungkan-niatnya-berhenti-aksi-kamisan

Kompas.com. (2024d, 26 Agustus). *KPU terbitkan PKPU 10 2024 syarat pencalonan Pilkada ikuti putusan MK*. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/26/10092221/kpu-terbitkan-pkpu-10-2024-syarat-pencalonan-pilkada-ikuti-putusan-mk

Kompas.com. (2024e, 18 Oktober). *Surat terakhir aksi Kamisan untuk presiden*. https://nasional.kompas.com/read/2024/10/18/11184771/surat-terakhir-aksi-kamisan-untuk-presiden

Kompas.com. (2024f, 22 Agustus). *Tak penuhi kuorum rapat paripurna UU Pilkada hanya dihadiri 89 orang*. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/10524261/tak-penuhi-kuorum-rapat-paripurna-uu-pilkada-hanya-dihadiri-89-orang

Kompas.com. (2025a, 17 Maret). *Aktivis KontraS langsung dipanggil polisi usai geruduk rapat RUU TNI YLBHI*. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/15483601/aktivis-kontras-langsung-dipanggil-polisi-usai-geruduk-rapat-ruu-tni-ylbhi

Kompas.com. (2025b, 18 Februari). *Cara pemerintah lawan tren #KaburAjaDulu*. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/18/17025611/cara-pemerintah-lawan-tren-kaburajadulu

Kompas.com. (2025c, 25 Maret). *Demo tolak UU TNI di Surabaya 25 demonstran yang ditangkap dibebaskan*. https://surabaya.kompas.com/read/2025/03/25/141112178/demo-tolak-uu-tni-di-surabaya-25-demonstran-yang-ditangkap-dibebaskan

Kompas.com. (2025d, 24 Maret). *Demo UU TNI ricuh di Malang 10 orang dilaporkan hilang*. https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/03/24/093900988/demo-uu-tni-ricuh-di-malang-10-orang-dilaporkan-hilang

Kompas.com. (2025e, 3 Februari). *Dosen ASN ancam mogok mengajar jika tuntutan tukin tak dipenuhi*. https://www.kompas.com/edu/read/2025/02/03/150124271/dosen-asn-ancam-mogok-mengajar-jika-tuntutan-tukin-tak-dipenuhi

Kompas.com. (2025f, 3 Februari). *Dosen ASN Kemendikti ancam mogok nasional jika tukin tak kunjung cair*. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/03/14280061/dosen-asn-kemendikti-ancam-mogok-nasional-jika-tukin-tak-kunjung-cair

Kompas.com. (2025g, 5 September). *DPR jawab 178 tuntutan rakyat hapus tunjangan rumah dan janji perkuat*. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/20234861/dpr-jawab-178-tuntutan-rakyat-hapus-tunjangan-rumah-dan-janji-perkuat

Kompas.com. (2025h, 8 Januari). *Kemendikti saintek tukin dosen ASN tidak bisa cair di 2025*. https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/08/160425771/kemendikti-saintek-tukin-dosen-asn-tidak-bisa-cair-di-2025

Kompas.com. (2025i, 1 September). *Pernyataan lengkap Prabowo batalkan tunjangan DPR dan perintahkan TNI POLRI*. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/01/11404391/pernyataan-lengkap-prabowo-batalkan-tunjangan-dpr-dan-perintahkan-tni-polri

Kompas.com. (2025j, 3 Maret). *Pilih beralih ke SPBU swasta gara gara Pertamax oplosan warga merasa*. https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/03/19404151/pilih-beralih-ke-spbu-swasta-gara-gara-pertamax-oplosan-warga-merasa

Kompas.com. (2025k, 1 September). *Prabowo soal gedung DPRD dibakar niatnya bikin rusuh*. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/01/17132441/prabowo-soal-gedung-dprd-dibakar-niatnya-bikin-rusuh

Kompas.com. (2025l, 31 Agustus). *Prabowo umumkan tunjangan anggota DPR dicabut kunjungan anggota dewan ke luar*. https://money.kompas.com/read/2025/08/31/155311026/prabowo-umumkan-tunjangan-anggota-dpr-dicabut-kunjungan-anggota-dewan-ke-luar

Kompas.com. (2025m, 5 September). *Ramai tuntutan rakyat 178 bagaimana respons pemerintah DPR dan parpol*. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/06352251/ramai-tuntutan-rakyat-178-bagaimana-respons-pemerintah-dpr-dan-parpol

Kompas.com. (2026a, 30 April). *KSPI batal demo di hari buruh usai bertemu Prabowo pilih rayakan May Day di*. https://money.kompas.com/read/2026/04/30/073333626/kspi-batal-demo-di-hari-buruh-usai-bertemu-prabowo-pilih-rayakan-may-day-di

Kompas.com. (2026b, 1 Mei). *Polisi tangkap 101 orang saat demo buruh di DPR diduga ingin bikin rusuh*. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/05/01/21520841/polisi-tangkap-101-orang-saat-demo-buruh-di-dpr-diduga-ingin-bikin-rusuh

Kompas.id. (2018). *Setelah lebih dari sepuluh tahun Kamisan*. https://www.kompas.id/artikel/setelah-lebih-dari-sepuluh-tahun-kamisan

Kompas.id. (2020). *Banyak klaster RUU Cipta Kerja bermasalah*. https://www.kompas.id/artikel/banyak-klaster-ruu-cipta-kerja-bermasalah

Kompas.id. (2024). *JSKK putuskan tak lagi kirim surat kepada presiden soal penuntasan kasus HAM berat*. https://www.kompas.id/artikel/jskk-putuskan-tak-lagi-kirim-surat-kepada-presiden-soal-penuntasan-kasus-ham-berat

Kompas.id. (2025a). *Api demonstrasi UU TNI seantero negeri*. https://www.kompas.id/artikel/api-demonstrasi-uu-tni-seantero-negeri

Kompas.id. (2025b). *Dosen suarakan tuntutan pembayaran tukin lewat papan bunga*. https://www.kompas.id/artikel/dosen-suarakan-tuntutan-pembayaran-tukin-lewat-papan-bunga

Kompas.id. (2025c). *Hadiah Prabowo untuk buruh Satgas PHK hingga dewan kesejahteraan buruh*. https://www.kompas.id/artikel/hadiah-prabowo-untuk-buruh-satgas-phk-hingga-dewan-kesejahteraan-buruh

Kompas.id. (2025d). *Janjikan aksi lebih besar pemerintah didesak pangkas potongan tarif ojek daring*. https://www.kompas.id/artikel/janjikan-aksi-lebih-besar-pemerintah-didesak-pangkas-potongan-tarif-ojek-daring

Kompas.tv. (2025). *Pidato Prabowo saat hadiri May Day 2025 di Monas janji buat dewan kesejahteraan hingga Satgas PHK*. https://www.kompas.tv/nasional/590986/pidato-prabowo-saat-hadiri-may-day-2025-di-monas-janji-buat-dewan-kesejahteraan-hingga-satgas-phk

Kontan. (2022). *Resmi Jokowi terbitkan Perppu nomor 2 tahun 2022 gantikan UU Cipta Kerja ini isinya*. https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-jokowi-terbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2022-gantikan-uu-cipta-kerja-ini-isinya

Kontan. (2026). *Pemerintah segera rilis kebijakan nyata jawab 178 tuntutan rakyat*. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-segera-rilis-kebijakan-nyata-jawab-178-tuntutan-rakyat

Kumparan. (2018). *9 hal yang harus kamu ketahui tentang demo ojek online*. https://kumparan.com/kumparannews/9-hal-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-demo-ojek-online

Kumparan. (2020). *Respons Jokowi KSPI batal demo buruh jelang May Day 30 April*. https://kumparan.com/kumparannews/respons-jokowi-kspi-batal-demo-buruh-jelang-may-day-30-april-1tHmpPFuOER

Kumparan. (2022). *Dinilai tak mampu emban tugas mantan direktur RS sele be solu angkat bicara*. https://kumparan.com/balleonews/dinilai-tak-mampu-emban-tugas-mantan-direktur-rs-sele-be-solu-angkat-bicara-1yJd7OGHSzL

Kumparan. (2024a). *Apa itu Garuda Biru inilah makna dan awal kemunculannya*. https://kumparan.com/kabar-harian/apa-itu-garuda-biru-inilah-makna-dan-awal-kemunculannya-23NwBWjKpO2/3

Kumparan. (2024b). *Sempat beri vote setuju di Baleg PKS kini dukung pembatalan revisi RUU Pilkada*. https://kumparan.com/kumparannews/sempat-beri-vote-setuju-di-baleg-pks-kini-dukung-pembatalan-revisi-ruu-pilkada-23NSMf1aMc9

LBH Jakarta. (2021). *Refleksi 1 tahun Omnibus Law UU Cipta Kerja hilangnya jaminan kesejahteraan di tengah pandemi*. https://bantuanhukum.or.id/refleksi-1-tahun-omnibus-law-uu-cipta-kerja-hilangnya-jaminan-kesejahteraan-di-tengah-pandemi/

Liputan6. (2019). *Cek fakta hoaks kabar mahasiswa meninggal akibat demo 24 September 2019*. https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4071273/cek-fakta-hoaks-kabar-mahasiswa-meninggal-akibat-demo-24-september-2019

Liputan6. (2025). *Prabowo tunjangan DPR dicabut dan moratorium kunker luar negeri*. https://www.liputan6.com/news/read/6147005/prabowo-tunjangan-dpr-dicabut-dan-moratorium-kunker-luar-negeri

Liputan6. (2026). *Deretan janji Prabowo di hari buruh 2026*. https://www.liputan6.com/news/read/6326895/deretan-janji-prabowo-di-hari-buruh-2026

Litbang Kompas. (2025). *Survei 100 hari Prabowo Gibran kepuasan publik 809 persen pemerataan jadi tantangan*. https://www.kompas.id/artikel/survei-100-hari-prabowo-gibran-kepuasan-publik-809-persen-pemerataan-jadi-tantangan

Merdeka. (2025). *Video Prabowo soal demo tolak revisi UU TNI murni apa dibayar harus objektif kita bukan anak kecil*. https://www.merdeka.com/peristiwa/video-prabowo-soal-demo-tolak-revisi-uu-tni-murni-apa-dibayar-harus-objektif-kita-bukan-anak-kecil-371478-mvk.html

Metro TV. (2024). *Kenaikan UKT di UNY dibatalkan*. https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9YjG-kenaikan-ukt-di-uny-dibatalkan

Metro TV. (2025a). *Aksi massa ojek online 20 Mei 2025 ini tuntutan lengkapnya*. https://www.metrotvnews.com/play/NP6C3Por-aksi-massa-ojek-online-20-mei-2025-ini-tuntutan-lengkapnya

Metro TV. (2025b). *Puncak demo Indonesia gelap ini tuntutan BEM SI*. https://www.metrotvnews.com/play/b3JCpEdd-puncak-demo-indonesia-gelap-ini-tuntutan-bem-si

Ombudsman RI. (2020). *Kasus 109 tenaga medis dipecat bupati Ogan Ilir penyelidikan Ombudsman mengarah malaadministrasi*. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-109-tenaga-medis-dipecat-bupati-ogan-ilir-penyelidikan-ombudsman-mengarah-malaadministrasi

Qothrunnada, Kholida. (2023). *Tri tuntutan rakyat Tritura sejarah isi dan dampaknya bagi orde lama*. https://news.detik.com/berita/d-6815029/tri-tuntutan-rakyat-tritura-sejarah-isi-dan-dampaknya-bagi-orde-lama

Republika. (2021). *Nakes RSUD Bengkulu pertanyakan pencairan insentif Covid-19*. https://news.republika.co.id/berita/qn6j8d414/nakes-rsud-bengkulu-pertanyakan-pencairan-insentif-covid-19

Republika. (2024). *BEM SI minta seluruh BEM audiensi pembatalan kenaikan UKT ke rektorat*. https://news.republika.co.id/berita/se59dm430/bem-si-minta-seluruh-bem-audiensi-pembatalan-kenaikan-ukt-ke-rektorat

RM.id. (2026a). *Apresiasi terbitnya Perpres 272026 DPR dukung perlindungan pekerja transportasi online*. https://rm.id/baca-berita/parlemen/309701/apresiasi-terbitnya-perpres-272026-dpr-dukung-perlindungan-pekerja-transportasi-online

RM.id. (2026b). *Pemerintah respons tuntutan demonstran program MBG tidak dihentikan tapi diperbaiki*. https://rm.id/baca-berita/nasional/314272/pemerintah-respons-tuntutan-demonstran-program-mbg-tidak-dihentikan-tapi-diperbaiki

Setneg. (2023a). *Presiden akan keluarkan Inpres untuk selesaikan rekomendasi tim PPHAM*. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_akan_keluarkan_inpres_untuk_selesaikan_rekomendasi_tim_ppham

Setneg. (2023b). *Presiden Jokowi sesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di tanah air*. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air

Setneg. (2025). *Presiden Prabowo tegaskan komitmen pemerintah untuk kesejahteraan pekerja dalam peringatan hari buruh di Monas*. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_komitmen_pemerintah_untuk_kesejahteraan_pekerja_dalam_peringatan_hari_buruh_di_monas

Suara Surabaya. (2025). *Demonstran yang ditangkap polisi saat demo tolak UU TNI di Grahadi diduga 25 orang*. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/demonstran-yang-ditangkap-polisi-saat-demo-tolak-uu-tni-di-grahadi-diduga-25-orang/

Telisik. (2024). *UKT perguruan tinggi negeri makin mencekik Kemendikbudristek kuliah tidak wajib itu tersier*. https://telisik.id/news/ukt-perguruan-tinggi-negeri-makin-mencekik-kemendikbudristek-kuliah-tidak-wajib-itu-tersier

Tempo. (2018). *Ojek online keluhkan penghasilan turun jauh di bawah UMR*. https://www.tempo.co/ekonomi/ojek-online-keluhkan-penghasilan-turun-jauh-di-bawah-umr-942748

Tempo. (2019a). *6 fakta demo mahasiswa di DPR menentang RUU bermasalah*. https://www.tempo.co/arsip/6-fakta-demo-mahasiswa-di-dpr-menentang-ruu-bermasalah-702897

Tempo. (2019b). *Gelombang demonstrasi mahasiswa menggulung dominasi DPR*. https://www.tempo.co/politik/gelombang-demonstrasi-mahasiswa-menggulung-dominasi-dpr-702882

Tempo. (2019c). *Isi lengkap pidato pertama presiden Jokowi setelah dilantik*. https://www.tempo.co/politik/isi-lengkap-pidato-pertama-presiden-jokowi-setelah-dilantik-694013

Tempo. (2019d). *Menristek minta rektor hukum dosen yang kerahkan mahasiswa demo*. https://www.tempo.co/politik/menristek-minta-rektor-hukum-dosen-yang-kerahkan-mahasiswa-demo-702364

Tempo. (2020a). *Dua pekan gelombang demo Omnibus Law di Jakarta*. https://www.tempo.co/arsip/dua-pekan-gelombang-demo-omnibus-law-di-jakarta-572775

Tempo. (2020b). *Upaya meredam massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja*. https://www.tempo.co/arsip/upaya-meredam-massa-aksi-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-574491

Tempo. (2024a). *Demokrat tarik diri tak lanjutkan pembahasan RUU Pilkada*. https://www.tempo.co/politik/demokrat-tarik-diri-tak-lanjutkan-pembahasan-ruu-pilkada-16457

Tempo. (2024b). *Hardiknas mahasiswa UGM demo tolak UKT yang memberatkan*. https://www.tempo.co/politik/hardiknas-mahasiswa-ugm-demo-tolak-ukt-yang-memberatkan-62814

Tempo. (2024c). *Hari ini mulai pendaftaran kandidat Pilkada 2024 meengok 6 hal aksi kawal putusan MK*. https://www.tempo.co/pemilu/hari-ini-mulai-pendaftaran-kandidat-pilkada-2024-meengok-6-hal-aksi-kawal-putusan-mk-15442

Tempo. (2024d). *Jalan keras kawal putusan MK hingga gagalkan DPR sahkan revisi UU Pilkada berikut kronologinya*. https://www.tempo.co/politik/jalan-keras-kawal-putusan-mk-hingga-gagalkan-dpr-sahkan-revisi-uu-pilkada-berikut-kronologinya-15410

Tempo. (2024e). *Jokowi bilang kenaikan UKT kemungkinan dimulai tahun depan*. https://www.tempo.co/politik/jokowi-bilang-kenaikan-ukt-kemungkinan-dimulai-tahun-depan-55026

Tempo. (2024f). *Mahasiswa UGM UNSOED UNRI USU dan UIN Jakarta kritisi soal kenaikan UKT*. https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-ugm-unsoed-unri-usu-dan-uin-jakarta-kritisi-soal-kenaikan-ukt-59873

Tempo. (2024g). *Nadiem makarim batalkan kenaikan UKT usai tuai banyak aksi protes bagaimana teknis pembatalannya*. https://www.tempo.co/politik/nadiem-makarim-batalkan-kenaikan-ukt-usai-tuai-banyak-aksi-protes-bagaimana-teknis-pembatalannya--54078

Tempo. (2024h). *YLBHI catat puluhan tindakan represif aparat saat demo kawal putusan MK*. https://www.tempo.co/hukum/ylbhi-catat-puluhan-tindakan-represif-aparat-saat-demo-kawal-putusan-mk--16605

Tempo. (2025a). *Aksi Indonesia gelap ricuh massa melempar petasan dan molotiv ke polisi*. https://www.tempo.co/hukum/aksi-indonesia-gelap-ricuh-massa-melempar-petasan-dan-molotiv-ke-polisi--1210425

Tempo. (2025b). *Aliansi dosen kirim karangan bunga ke Kemendiktisaintek tuntut realisasi tukin*. https://www.tempo.co/politik/aliansi-dosen-kirim-karangan-bunga-ke-kemendiktisaintek-tuntut-realisasi-tukin-1190309

Tempo. (2025c). *Daftar pernyataan Prabowo soal demonstrasi Agustus*. https://www.tempo.co/infografik/infografik/daftar-pernyataan-prabowo-soal-demonstrasi-agustus-2065937

Tempo. (2025d). *DPR sahkan revisi UU TNI bagaimana tahapan penyusunan RUU menjadi UU*. https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-tni-bagaimana-tahapan-penyusunan-ruu-menjadi-uu--1222202

Tempo. (2025e). *Ini kejadian yang picu demonstrasi bubarkan DPR*. https://www.tempo.co/politik/ini-kejadian-yang-picu-demonstrasi-bubarkan-dpr-2065603

Tempo. (2025f). *Jumlah tersangka demo Agustus hampir seribu*. https://www.tempo.co/hukum/jumlah-tersangka-demo-agustus-hampir-seribu-2073825

Tempo. (2025g). *Kemenhub potongan tarif ojol 20 persen sudah sesuai aturan*. https://www.tempo.co/ekonomi/kemenhub-potongan-tarif-ojol-20-persen-sudah-sesuai-aturan-2049161

Tempo. (2025h). *Kronologi demo memprotes DPR hingga meluas berubah penjarahan*. https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182

Tempo. (2025i). *Mahasiswa universitas Trisakti diadang aparat kepolisian saat perjalanan ke aksi demo Indonesia gelap*. https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-universitas-trisakti-diadang-aparat-kepolisian-saat-perjalanan-ke-aksi-demo-indonesia-gelap-1208418

Tempo. (2025j). *Pernyataan dan hoaks picu penjarahan rumah Syahroni sampai SMI*. https://www.tempo.co/hukum/pernyataan-dan-hoaks-picu-penjarahan-rumah-syahroni-sampai-smi-2065219

Tempo. (2025k). *Polda metro jaya tangkap 14 orang peserta unjuk rasa hari buruh depan gedung DPR*. https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-tangkap-14-orang-peserta-unjuk-rasa-hari-buruh-depan-gedung-dpr-1324498

Tempo. (2025l). *Polda metro jaya tetapkan 43 tersangka demo rusuh di Jakarta*. https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-tetapkan-43-tersangka-demo-rusuh-di-jakarta-2066815

Tempo. (2025m). *Polisi tersangkakan paramedis paralegal aksi hari buruh*. https://www.tempo.co/hukum/polisi-tersangkakan-paramedis-paralegal-aksi-hari-buruh-1633193

Tempo. (2025n). *Prabowo Luhut dan Zulkifli Hasan menolak narasi Indonesia gelap*. https://www.tempo.co/politik/prabowo-luhut-dan-zulkifli-hasan-menolak-narasi-indonesia-gelap-1234757

Tempo. (2025o). *Ragam demo BEM SI dalam aksi Indonesia gelap di berbagai daerah*. https://www.tempo.co/politik/ragam-demo-bem-si-dalam-aksi-indonesia-gelap-di-berbagai-daerah-1208820

Tempo. (2025p). *Tujuh korban jiwa dalam demonstrasi 28–30 Agustus*. https://www.tempo.co/hukum/tujuh-korban-jiwa-dalam-demonstrasi-28-30-agustus-2065197

Tempo. (2026a). *Alasan aliansi Gebrak tak ikut May Day di Monas*. https://nasional.tempo.co/read/2101124/alasan-aliansi-gebrak-tak-ikut-may-day-di-monas

Tempo. (2026b). *Aparat hadang aksi mahasiswa sempat adu dorong*. https://www.tempo.co/politik/aparat-hadang-aksi-mahasiswa-sempat-adu-dorong-2268795

Tempo. (2026c). *Badan komunikasi bantah pemerintah setir demo dukung MBG*. https://www.tempo.co/politik/badan-komunikasi-bantah-pemerintah-setir-demo-dukung-mbg-2271357

Tempo. (2026d). *BEM UI usung 5 tuntutan di demo Indonesia menuju bangkrut*. https://www.tempo.co/politik/bem-ui-usung-5-tuntutan-di-demo-indonesia-menuju-bangkrut-2268588

Tempo. (2026e). *Bus disetop polisi massa demo jalan kaki ke bundaran HI*. https://www.tempo.co/hukum/bus-disetop-polisi-massa-demo-jalan-kaki-ke-bundaran-hi-2268805

Tempo. (2026f). *Partai buruh pindahkan lokasi May Day dari DPR ke Monas*. https://www.tempo.co/politik/partai-buruh-pindahkan-lokasi-may-day-dari-dpr-ke-monas-2132519

Tempo. (2026g). *Polisi dan TNI hadang aksi mahasiswa menuju bundaran HI*. https://www.tempo.co/politik/polisi-dan-tni-hadang-aksi-mahasiswa-menuju-bundaran-hi-2268756

Tempo. (2026h). *Respons demo mahasiswa istana tegaskan tak akan setop MBG*. https://www.tempo.co/politik/respons-demo-mahasiswa-istana-tegaskan-tak-akan-setop-mbg-2269171

Tempo. (2026i). *Sederet fakta aksi menuju Indonesia bangkrut*. https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta-aksi-menuju-indonesia-bangkrut-2268890

Tribun Papua. (2022, 16 Desember). *Setelah di demo ini penjelasan direktur RSUD Abepura mengenai insentif Covid-19*. https://papua.tribunnews.com/2022/12/16/setelah-di-demo-ini-penjelasan-direktur-rsud-abepura-mengenai-insentif-covid-19

UGM. (2025). *Ramai tagar kabur aja dulu pakar UGM bentuk sikap kritis dan sindiran anak muda atas situasi di tanah air*. https://ugm.ac.id/id/berita/ramai-tagar-kabur-aja-dulu-pakar-ugm-bentuk-sikap-kritis-dan-sindiran-anak-muda-atas-situasi-di-tanah-air/

VOA Indonesia. (2025). *Tolak kebijakan cek ombak ribuan massa lanjut demo #IndonesiaGelap*. https://www.voaindonesia.com/a/tolak-kebijakan-cek-ombak-ribuan-massa-lanjut-demo-indonesiagelap/7983134.html

NALAR INSTITUTE

